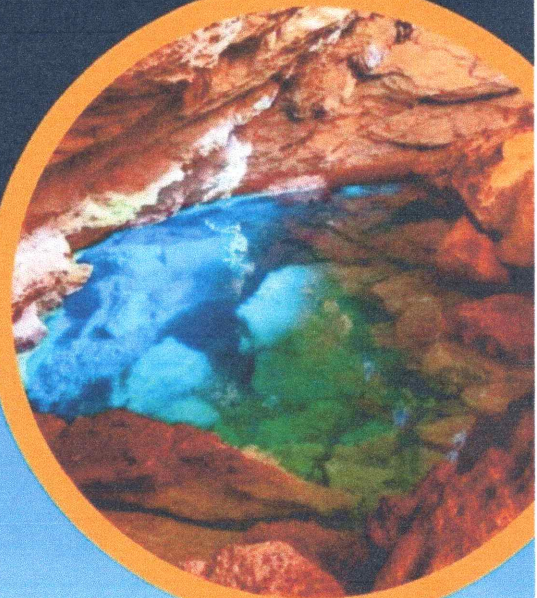


LAPORAN BULANAN BADAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI NTT

**JULI
2025**



badankeuanganprovntt@gmail.com



www.reallygreatsite.com

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas Kasih Karunia-Nya, kami dapat menyusun Laporan Kinerja Bulan Juli Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT Tahun Anggaran 2025.

Melalui Laporan Kinerja Bulanan Badan Keuangan Daerah ini diharapkan dapat mencerminkan kinerja Badan Keuangan Daerah selama Bulan Juli Tahun 2025, sekaligus dapat menjadi bahan informasi bagi berbagai pihak yang berminat untuk melihat dan mengukur pelaksanaan kinerja Perangkat Daerah.

Kami menyadari benar akan segala keterbatasan kemampuan dalam melaksanakan program pemerintah dimaksud. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun akan kami terima dengan terbuka.

Kupang, Agustus 2025

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,



Drs. BENHARD MENOH, MT
PEMBINA TINGKAT I (IV/B)
NIP. 19720512 199101 1 001

DAFTAR ISI

COVER	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum.....	1
1.3 Maksud Dan Tujuan	3
1.4 Organisasi dan Personalia	3
1.5 Sistematika Penyajian.....	6
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	7
2.1 Tugas dan Fungsi Organisasi Badan Keuangan Daerah.....	7
2.2 Target Kinerja.....	8
2.3 Perencanaan Anggaran Badan Keuangan Daerah TA. 2025	10
BAB III PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN	16
3.1 Pelayanan Administrasi Umum dan Kepegawaian	16
A. Pelayanan Administrasi dan Umum	16
B. Kepegawaian	17
3.2 Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan.....	19
A. Realisasi Anggaran pada Badan Keuangan Daerah	19
1. Realisasi Pendapatan	19
2. Realisasi Belanja.....	24
B. Kinerja Badan Keuangan Daerah	31
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.....	31
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah	35
BAB IV PENUTUP	68
4.1 Permasalahan dan Solusi.....	68
1. Sekretariat	68
2. Anggaran	69
3. Bidang Perbendaharaan.....	69
3. Bidang Akuntansi dan Pelaporan	70
4. Bidang Pembinaan Keuangan Kabupaten/Kota	70
BAB IV PENUTUP	110

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah.....	5
---	---

DAFTAR TABEL

2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Badan Keuangan Daerah	8
2.2 Penganggaran Badan Keuangan Daerah TA. 2025	10
3.1 Rekapitulasi Surat Masuk	16
3.2 Rekapitulasi Surat Keluar	16
3.3 Komposisi Pegawai berdasarkan Jabatan Struktural/Fungsional	17
3.4 Komposisi Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin dan Golongan	17
3.5 Komposisi Pegawai berdasarkan Agama	18
3.6 Komposisi Pegawai berdasarkan Pendidikan Umum	18
3.7 Komposisi Tenaga Kontrak	19
3.8 Realisasi Pendapatan pada Badan Keuangan	19
3.9 Realisasi Anggaran Belanja pada Badan Keuangan Daerah	25
3.10 Hasil Pelaksanaan Tugas Bidang Anggaran	37
3.11 Hasil Pelaksanaa Tugas Bidang Pembinaan Keuangan Kabupaten/Kota	40
3.12 Hasil Pelaksanaa Tugas Bidang Perbendaharaan	59
3.13 Hasil Pelaksanaan Tugas Bidang Akuntansi dan Pelaporan	66

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyusun kebijakan Pemerintah daerah di bidang keuangan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT pada Bulan Juli Tahun Anggaran 2025 telah melaksanakan berbagai program kegiatan dan berbagai program kegiatan tersebut dilaksanakan dengan maksud agar seluruh rencana program dan kegiatan dapat terealisasi, terarah dan tepat sasaran.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan pada Bulan Juli 2025 maka disusunlah Laporan Kinerja Badan Keuangan Daerah Bulan Juli Tahun Anggaran 2025 yang diharapkan dapat menjadi informasi tentang kinerja Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT sekaligus menjadi bahan masukan bagi peningkatan Akuntabilitas kinerja pada masa yang akan datang. Peningkatan kinerja diperlukan agar Badan Keuangan Daerah dapat lebih meningkatkan tugas dan fungsinya dalam rangka berperan memberikan dukungan teknis dan administrasi di bidang keuangan daerah.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;

- c. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Nomor Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810)
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- i. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya;
- j. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- k. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor 006).

1. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 81 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024).

1.3 Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Bulan Juli Tahun Anggaran 2025 Badan Keuangan Daerah merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan Kinerja Bulan Juli Tahun Anggaran 2025 Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT adalah untuk menilai serta mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT dengan dasar evaluasi yang dilakukan, selanjutnya dirumuskan beberapa rekomendasi yang dapat menjadi salah satu masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang guna peningkatan kinerja.

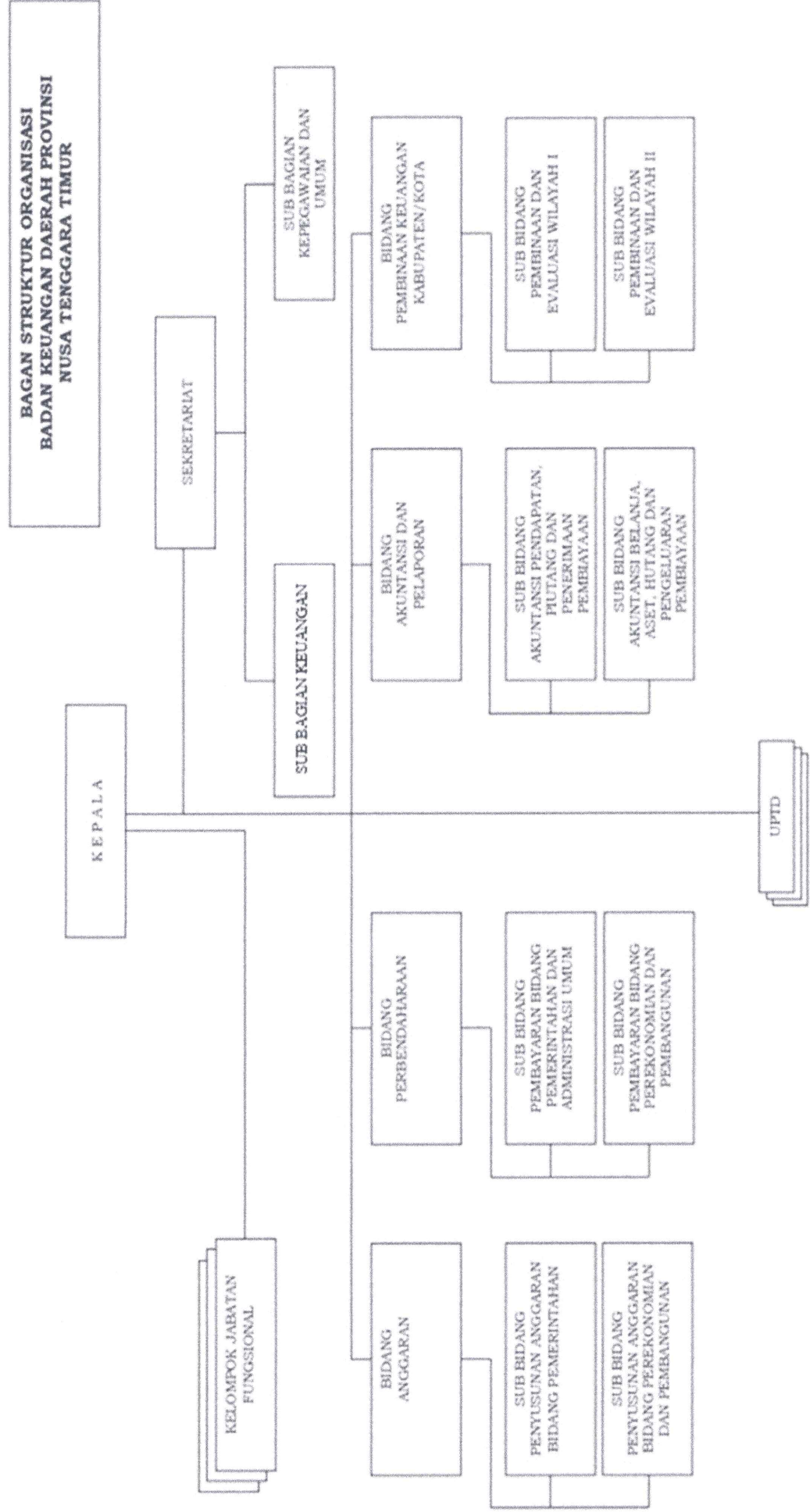
1.4 Organisasi dan Personalia

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, struktur Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT terdiri dari :

- a. Sekretariat, terdiri atas :
 - 1) Sub Keuangan
 - 2) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
- b. Bidang Anggaran, terdiri atas :
 - 1) Sub Bidang Penyusunan Anggaran Bidang Pemerintahan.
 - 2) Sub Bidang Penyusunan Anggaran Bidang Perekonomian dan Pembangunan.
- c. Bidang Perbendaharaan, terdiri atas :
 - 1) Sub Bidang Pembayaran Bidang Pemerintahan dan Administrasi Umum.
 - 2) Sub Bidang Pembayaran Bidang Perekonomian dan Pembangunan.

- d. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, terdiri atas :
 - 1) Sub Bidang Akuntansi Pendapatan, Piutang dan Penerimaan Pembiayaan.
 - 2) Sub Bidang Akuntansi Belanja, Aset, Hutang dan Pengeluaran Pembiayaan.
- e. Bidang Pembinaan Keuangan Kabupaten /Kota, terdiri atas :
 - 1) Sub Bidang Pembinaan dan Evaluasi Wilayah I.
 - 2) Sub Bidang Pembinaan dan Evaluasi Wilayah II.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional tertentu.

Gambar 1.1



1.5 Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Kinerja Bulan Juli Tahun Anggaran 2025 ini secara umum menginformasikan capaian kinerja Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT Bulan Juli Tahun Anggaran 2025. Membandingkan antara capaian kinerja dengan rencana kinerja sebagai tolak ukur keberhasilan dari hasil analisis terhadap celah kinerja tersebut, dapat diperoleh masukan bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Dengan pola pikir dimaksud, sistematika penyajian Laporan Kinerja Bulan Juli Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Organisasi dan Personalia
- 1.5 Sistematika Penyajian

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

- 2.1 Tugas dan Fungsi Badan Keuangan Daerah
- 2.2 Target Kinerja

BAB III PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Pelayanan Administrasi Umum dan Kepegawaian
- 3.2 Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan

BAB IV PERMASALAHAN DAN SOLUSI

- 4.1 Permasalahan
- 4.2 Solusi

BAB V PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Tugas dan Fungsi Badan Keuangan Daerah

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 95 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Badan Keuangan Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang Keuangan yang menjadi kewenangan daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Keuangan Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang keuangan daerah.
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan daerah.
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan daerah.
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang keuangan daerah.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2 Target Kinerja

Pada tahun 2025, Perjanjian Kinerja Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT adalah untuk mewujudkan manajemen target kinerja jangka menengah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil.

Adapun Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 BADAN KEUANGAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

A. Sasaran Strategis Perangkat Daerah yang tertuang dalam RENSTRA/IKU Perangkat Daerah

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	5
1.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah yang Efektif, Efisien, Transparan Dan Akuntabel	1. Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan Secara Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan Perundang - Undangan 2. Persentase Renperda APBD Kabupaten/Kota Yang Difasilitasi Tepat Waktu	100 % 100 %

B. Pelaksanaan Anggaran

No	Uraian	Alokasi	Target
1.	APBD		
a.	Belanja (Program)	Rp. 787.073.147.705,-	Realisasi minimal 85%
	1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 20.990.960.988,-	Realisasi minimal 90%
	2. Pengelola Keuangan Daerah	Rp. 766.082.186.717,-	Realisasi minimal 85%
b.	Pendapatan	Rp. 3.416.135.171.857,-	Realisasi minimal 90%
	Jumlah Belanja+Pendapatan (APBD)	Rp. 4.203.208.319.562,-	Realisasi minimal 90%

2. APBN			
a. Program Dekonsentrasi		Rp. -	-
1. Percepatan Pelaksanaan Pembangunan		Rp. -	-
2. Bina Administrasi Kewilayahan		Rp. -	-
b. Program Tugas Pembantuan		Rp. -	-
Jumlah Dekonsentrasi + Tugas Pembantuan		Rp. -	-

2.3 Perencanaan Anggaran Badan Keuangan Daerah TA. 2025

Berdasarkan DPA Badan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2025, penganggaran Badan Keuangan dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut ini :

Tabel 2.2

Perencanaan Anggaran Badan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2025

						KEUANGAN	787.073.147.705
0	0	0	2			Badan Keuangan Daerah	787.073.147.705
0	1					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	20.990.960.988
1	1	0	1			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	422.994.096
1	1	0	1	0	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	65.246.000
1	1	0	1	0	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	104.060.800
1	1	0	1	0	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	85.903.727
1	1	0	1	0	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	76.433.569
1	1	0	1	0	8	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	41.350.000
1	1	0	1	1	0	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	50.000.000
1	1	0	2			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.840.365.766
1	1	0	2	0	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.320.416.166
1	1	0	2	0	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.023.606.600
1	1	0	2	0	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	150.000.000
1	1	0	2	0	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	75.330.000
1	1	0	2	0	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	64.173.000

1	1	0	2	0	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	71.519.000
1	1	0	2	0	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	75.509.000
1	1	0	2	0	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	46.312.000
1	1	0	3			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	20.000.000
1	1	0	3	0	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	10.000.000
1	1	0	3	0	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.000.000
1	1	0	5			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	232.158.000
1	1	0	5	0	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	141.079.000
1	1	0	5	0	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	91.079.000
1	1	0	5	0	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-
1	1	0	5	0	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-
1	1	0	6			Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.455.980.242
1	1	0	6	0	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	27.709.000
1	1	0	6	0	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	26.189.000
1	1	0	6	0	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	355.243.520
1	1	0	6	0	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	52.500.000
1	1	0	6	0	7	Penyediaan Bahan/Material	200.000.000
1	1	0	6	0	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	424.792.286
1	1	0	6	0	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	337.640.000

1	1	0	6	0	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	31.906.436
1	1	0	7			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.040.679.000
1	1	0	7	0	5	Pengadaan Mebel	38.824.000
1	1	0	7	0	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	501.855.000
1	1	0	7	0	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	500.000.000
1	1	0	8			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.671.463.884
1	1	0	8	0	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	34.565.400
1	1	0	8	0	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	750.000.000
1	1	0	8	0	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.886.898.484
1	1	0	9			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	287.320.000
1	1	0	9	0	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	236.820.000
1	1	0	9	0	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.500.000
1	1	1	4			Fasilitasi Keprotokolan	20.000.000
1	1	1	4	0	1	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	20.000.000
0	2					PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	766.082.186.717
2	2	0	1			Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	9.117.716.177
2	2	0	1	0	1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	409.098.000
2	2	0	1	0	2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	407.052.000
2	2	0	1	0	5	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	209.819.000
2	2	0	1	0	6	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	430.227.800

2	2	0	1	0	7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2.675.048.112
2	2	0	1	0	8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	3.023.238.813
2	2	0	1	0	9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1.963.232.452
2	2	0	2			Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	2.035.277.000
2	2	0	2	0	2	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	406.438.000
2	2	0	2	0	3	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	407.968.000
2	2	0	2	0	4	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	484.694.000
2	2	0	2	0	5	Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	608.470.500
2	2	0	2	0	7	Asistensi Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	41.398.000
2	2	0	2	0	12	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah	86.308.505
2	2	0	3			Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	1.853.943.796
2	2	0	3	0	1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	360.444.296

2	2	0	3	0	3	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	256.557.600
2	2	0	3	0	5	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	382.648.400
2	2	0	3	0	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	509.582.200
2	2	0	3	0	8	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	344.711.300
2	2	0	4			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	2.775.407.652
2	2	0	4	0	2	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	323.085.212
2	2	0	4	0	3	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	675.930.891
2	2	0	4	0	4	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	635.935.249
2	2	0	4	0	5	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	1.140.456.300
2	2	0	5			Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	750.299.842.087
2	2	0	5	0	4	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	47.206.923.484

2	2	0	5	0	8	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	36.691.308.847
2	2	0	5	0	9	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	13.149.302.896
2	2	0	5	0	10	Pengelolaan Dana bagi Hasil Provinsi	653.252.306.860

BAB III
PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Pelayanan Administrasi Umum dan Kepegawaian

A. Pelayanan Administrasi dan Umum

1. Surat Masuk

Tabel 3.1
Rekapitulasi Surat Masuk Badan Keuangan Daerah Prov. NTT
Per 31 Juli 2025

Unit	Jumlah Surat Masuk
Sekretariat	46
Bidang Anggaran	125
Bidang Akuntansi dan Pelaporan	50
Bidang Pembinaan Keuangan Kab/Kota	12
Bidang Perbendaharaan	153
Jumlah	386

Sumber : Sekretariat Badan Keuangan Daerah Prov. NTT

2. Surat Keluar

Tabel 3.2
Rekapitulasi Surat Keluar Badan Keuangan Daerah Prov. NTT
31 Mei 2025

Unit	Jumlah Surat Keluar
Sekretariat	102
Bidang Anggaran	16
Bidang Akuntansi dan Pelaporan	30
Bidang Pembinaan Keuangan Kab/Kota	25
Bidang Perbendaharaan	86
Jumlah	259

Sumber : Sekretariat Badan Keuangan Daerah Prov. NTT

B. Kepegawaian

Kedaaan pegawai pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur berjumlah 71 orang, dengan perincian sebagai berikut (sampai dengan 31 Juli 2025).

1. Berdasarkan Jabatan Struktural/Fungsional

Tabel 3.3

Komposisi Pegawai berdasarkan Jabatan Struktural/Fungsional

Kondisi 31 Juli 2025

NO	JABATAN	JUMLAH	TINGKATAN (eselon/ jenjang)	Ket
1.	Kepala Badan	1 orang	II-a	Ada
2.	Sekretaris	0 orang	III-a	Tidak Ada
3.	Kepala Bidang	1 orang	III-a	Ada
4.	Kepala Sub Bagian/Sub Bidang	9 orang	IV-a	Ada
5.	Fungsional Tertentu	17 orang		Ada
6	Pelaksana	90 orang		
<i>Total</i>		118 orang		

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Keuangan Daerah Prov. NTT

2. Berdasarkan Jenis Kelamin dan Golongan

Tabel 3.4

Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin dan Golongan

Kondisi 31 Juli 2025

NO	UNIT KERJA	JENIS KELAMIN	GOLONGAN									
1.	Sekretariat	L	P	I	II	III	IV	V	VII	XI	-	-
2.	Bidang Anggaran	6	4	-	-	8	2	-	-	-	-	-
3.	Bidang Perbendaharaan	3	10	-	-	13	-	-	-	-	-	-
4.	Bidang Akuntansi dan Pelaporan	4	10	-	-	11	3	-	-	-	-	-
5.	Bidang Pmbinaan Keuangan Kabupaten/Kota	6	6	-	1	10	1	-	-	-	-	-
6.	CPNS	4	5	-	-	9	-	-	-	-	-	-

7.	PPPK	25	22	1	-	-	-	8	4	34
Jumlah		55	63	1	2	61	8	8	4	34
Total		118			118					

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Keuangan Daerah Prov. NTT

3. Berdasarkan Agama

Tabel 3.5

Komposisi Pegawai Berdasarkan Agama

Kondisi 31 Juli 2025

NO	UNIT KERJA	AGAMA				
		KP	KK	Islam	Hindu	Budha
1.	Sekretariat	7	5	1	-	-
2.	Bidang Anggaran	4	6	-	-	-
3.	Bidang Perbendaharaan	7	5	1	-	-
4.	Bidang Akuntansi dan Pelaporan	6	7	1	-	-
5.	Bidang Pembinaan Keuangan Kabupaten/Kota	9	1	1	1	-
6.	CPNS	4	1	4	-	-
7.	PPPK	14	29	4	1	
<i>Jumlah</i>						-
Total		118				

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Keuangan Daerah Prov. NTT

4. Berdasarkan Pendidikan

Tabel 3.6

Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan Umum

Kondisi 31 Juli 2025

NO	UNIT KERJA	TINGKAT PENDIDIKAN						
		SD	SLTP	SLTA	D.I II/ III	D.IV	S1	S2
1.	Sekretariat	-	-	2	-	1	5	5
2.	Bidang Anggaran	-	-	-	1	-	7	2
3.	Bidang Perbendaharaan	-	-	-	3	-	8	2
4.	Bidang Akuntansi dan Pelaporan	-	-	-	1	-	6	7
5.	Bidang Pembinaan Keuangan Kabupaten/Kota	-	-	3	-	1	5	3

6.	CPNS	-	-	-	-	-	9	-
7.	PPPK	1	-	8		4	32	2
<i>Jumlah</i>		<i>1</i>	-	13	5	6	72	21
<i>Total</i>		118						

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Keuangan Daerah Prov. NTT

5. Tenaga Kontrak

Tabel 3.7.

Komposisi Tenaga Kontrak Daerah

Kondisi 31 Juli 2025

NO	TENAGA KONTRAK	JUMLAH
1.	LAKI-LAKI	13
2	PEREMPUAN	8
Total		21 orang

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Keuangan Daerah Prov. NTT

3.2 Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan

A. Realisasi Anggaran pada Badan Keuangan Daerah

1. Realisasi Pendapatan

Pada Tahun Anggaran 2025, Target Pendapatan Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT sebesar **Rp. 3.432.606.365.725,-**. Berikut adalah realisasi Pendapatan Daerah kondisi 31 Juli 2025:

Tabel. 3.8

Realisasi Pendapatan pada Badan Keuangan Daerah

Kondisi 31 Juli 2025

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
4.	PENDAPATAN DAERAH	3.432.606.365.725	1.852.275.257.114	53,96
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	119.519.178.857	254.304.683.324	212,77
4.1.03.	Hasil Pengelolaan Kekayaan	62.519.178.857	42.474.743.617	67,94

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
4.1.03.01.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	62.519.178.857	42.474.743.617	67,94
4.1.03.01.01.0001.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	62.250.000.000	42.474.743.617	67,94
4.1.03.02.02.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta	269.178.857		
4.1.04.	Lain-lain PAD yang Sah	57.000.000.000	211.829.939.707	371,63
4.1.04.05.	Jasa Giro	5.000.000.000	3.990.145.189	79,80
4.1.04.05.01.	Jasa Giro pada Kas Daerah	5.000.000.000	3.990.145.189	79,80
4.1.04.05.01.0001.	Jasa Giro pada Kas Daerah	5.000.000.000	3.990.145.189	79,80
4.1.04.07.	Pendapatan Bunga	1.000.000.000	1.862.226.095	186,22
4.1.04.07.01.	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	1.000.000.000	1.862.226.095	186,22
4.1.04.07.01.0001.	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	1.000.000.000	1.862.226.095	186,22
4.1.04.08.	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	30.000.000.000	709.436.565	2,36
4.1.04.08.01.	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	30.000.000.000	709.436.565	2,36
4.1.04.08.01.0001.	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	30.000.000.000	709.436.565	2,36
4.1.04.11.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan	10.000.000.000	100.516.595	1,01

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
	Pekerjaan			
4.1.04.11.01.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	10.000.000.000	100.516.595	1,01
4.1.04.11.01.0001.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	10.000.000.000	100.516.595	1,01
4.1.04.15.	Pendapatan dari Pengembalian	11.000.000.000	205.167.615.262	1865,16
4.1.04.15.01.	Pendapatan dari Pengembalian kelebihan pembayaran gaji pokok ASN	1.000.000.000	53.246.781	5,32
4.1.04.15.01.0001.	Pendapatan dari Pengembalian kelebihan pembayaran gaji pokok ASN	1.000.000.000	53.246.781	5,32
4.1.04.15.03.	Pendapatan dari Pengembalian kelebihan belanja tunjangan pph/tunjangan khusus /tunjangan PPPK			
4.1.04.15.03.0001.	Pendapatan dari Pengembalian kelebihan belanja tunjangan pph/tunjangan khusus /tunjangan PPPK			
4.1.04.15.04.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	10.000.000.000	205.114.368.481	2051,14
4.1.04.15.04.0001.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri- Perjalanan Dinas Biasa	10.000.000.000	205.114.368.481	2051,14
4.2.	PENDAPATAN TRANSFER	3.112.075.839.000	1.597.236.725.290	51,32
4.2.01.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.112.075.839.000	1.597.236.725.290	51,32

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
4.2.01.01.	Dana Perimbangan	3.112.075.839.000	1.597.236.725.290	51,32
4.2.1.01.06	Insentif Fiskal	6.700.771.000	3.350.385.500	50,00
4.2.1.01.06.02.01	Insentif Fiskal untuk Penghargaan Kinerja Tahun sebelumnya	6.700.771.000	3.350.385.500	50,00
4.2.01.07.01.	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	61.652.427.000	22.531.091.400	36,55
4.2.01.01.01.0001.	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	4.059.812.000	1.782.124.800	43,90
4.2.01.01.01.0003.	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	48.258.335.000	19.303.334.000	40,00
4.2.01.01.01.0004.	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	7.760.954.000	827.834.800	10,67
4.2.01.01.01.0007.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	1.046.825.000	628.095.000	60,00
4.2.01.01.01.0008.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara Landrent	397.747.000	238.648.200	60,00
4.2.01.07.02.0007.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	90.312.000	54.187.200	60,00
4.2.01.07.02.0008.	Bagi Hasil Sumber Daya Alam Dana Reboisasi (DR)	38.442.000	3.844.200	10,00
4.2.01.01.02.	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	2.029.253.589.000	1.1119.195.691.000	547,95
4.2.01.01.02.0001.	DAU tidak ditentukan penggunaannya	1.542.866.521.000	1.028.577.680.000	66,67
4.2.01.01.02.0004	DAU tambahan dukungan Pendanaan atas Penggajian PPPK	184.327.030.000	-	0,00
4.2.01.01.02.0005	DAU yg ditentukan penggunaannya bidang Pendidikan	260.918.641.000	78.275.592.000	30,00
4.2.01.01.02.0006	DAU yg ditentukan penggunaannya bidang Kesehatan	41.141.397.000	12.342.419.000	30,00
4.2.01.01.02.0007	DAU yg ditentukan penggunaannya bidang Pekerjaan Umum			-

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
4.2.01.01.03.	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	51.732.870.000	-	-
4.2.01.01.03.0004.	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA	33.415.284.000	-	0,00
4.2.01.01.03.0005.	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SLB	321.800.000	-	0,00
4.2.01.01.03.0060	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB -Reguler Penguatan Kesehatan	17.995.786.000	-	0,00
4.2.01.01.04.	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	962.736.182.000	451.852.580.590	46,93
4.2.01.01.04.0001.	DAK Non Fisik-BOS Reguler	495.437.539.000	258.641.456.500	52,20
4.2.01.01.04.0003.	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	10.931.750.000	-	0,00
4.2.01.01.04.0004.	DAK Non Fisik-TPG PNSD	419.218.077.000	181.698.513.745	43,34
4.2.01.01.04.0005.	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	8.472.748.000	-	0,00
4.2.01.01.04.0006.	DAK Non Fisik-TKG PNSD	16.318.485.000	7.259.331.030	44,49
4.2.01.01.04.0009.	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	1.881.156.000	904.522.400	48,08
4.2.01.01.04.0010.	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Taman Budaya	2.000.000.000	931.572.427	46,58
4.2.01.09.02.0022.	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	450.742.000	202.159.236	44,85
4.2.01.09.02.0032.	Bantuan Operasional Kesehatan	6.883.685.000	1.644.025.252	23,88
4.2.01.09.02.0039.	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	200.000.000	100.000.000	50,00
4.2.01.09.02.0041.	DAK Non Fisik-Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	750.000.000	375.000.000	50,00
4.2.01.09.02.0042.	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	42.000.000		0,00

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
4.2.01.09.02.0043.	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	150.000.000	75.000.000	50,00
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	201.011.347.868	733.848.500	0,37
4.3.01.	Pendapatan Hibah	201.011.347.868	733.848.500	0,37
4.3.01.01.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	201.011.347.868	733.848.500	0,37
4.3.01.01.01.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	201.011.347.868	733.848.500	0,37
4.3.01.01.01.0001.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat			
4.3.01.04.01.0001.	Pendapatan Hibah dari Badan / Lembaga / Organisasi Swasta Dalam Negeri			
4.3.01.03.01.0001.	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat / Perorangan	201.011.347.868	733.848.500	0,37
Jumlah		3.432.606.365.725	1.852.275.257.114	53,96

Sumber Bidang Perbendaharaan (BUD)

2. Realisasi Anggaran Belanja berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025 Nomor : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.03.0000/001/2025, Belanja Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk Tahun Anggaran 2025 sebesar **Rp. 787.073.147.705,-** Pagu dan Realisasi Anggaran tercantum pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.9
Realisasi Anggaran Belanja pada Badan Keuangan Daerah
Kondisi 31 Juli 2025

NO						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
						KEUANGAN	787.073.147.705	224.182.876.264	28,48%
0	0	0	2			Badan Keuangan Daerah	787.073.147.705	224.182.876.264	28,48%
0	1					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	20.990.960.988	8.258.827.309	39,34%
1	1	0	1			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	422.994.096	201.264.717	47,58%
1	1	0	1	0	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	65.246.000	43.850.516	67,21%
1	1	0	1	0	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	104.060.800	69.780.501	67,06%
1	1	0	1	0	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	85.903.727	46.453.500	54,08%
1	1	0	1	0	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	76.433.569	41.180.200	53,88%
1	1	0	1	0	8	Pelaksanaan pengumpulan data statistik sektoral daerah	41.350.000		0,00%
1	1	0	1	0	10	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	50.000.000		0,00%
1	1	0	2			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.840.365.766	5.091.512.059	36,79%
1	1	0	2	0	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.320.416.166	4.581.961.567	40,48%
1	1	0	2	0	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.023.606.600	262.214.500	12,96%
1	1	0	2	0	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	163.500.000	99.199.825	60,67%
1	1	0	2	0	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	75.330.000	9.449.000	12,54%

NO						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
1	1	0	2	0	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	64.173.000	60.028.967	93,54%
1	1	0	2	0	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	71.519.000	53.822.200	75,26%
1	1	0	2	0	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	75.509.000	16.890.000	22,37%
1	1	0	2	0	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	46.312.000	7.946.000	17,16%
1	1	0	3			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	20.000.000	4.264.000	21,32%
1	1	0	3	0	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	10.000.000		0,00%
1	1	0	3	0	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.000.000	4.264.000	42,64%
1	1	0	5			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	232.158.000	94.921.203	40,89%
1	1	0	5	0	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	141.079.000	74.605.823	52,88%
1	1	0	5	0	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	91.079.000	20.315.380	22,31%
1	1	0	6			Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.455.980.242	718.699.125	49,36%
1	1	0	6	0	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	27.709.000	500.000	1,80%
1	1	0	6	0	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	26.189.000	1.153.239	4,40%
1	1	0	6	0	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	355.243.520	147.337.376	41,48%
1	1	0	6	0	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	52.500.000	26.040.000	49,60%
1	1	0	6	0	7	Penyediaan Bahan/Material	200.000.000	122.133.669	60,07%
1	1	0	6	0	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	424.792.286	294.311.251	69,28%

NO						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
1	1	0	6	0	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	337.640.000	127.223.590	37,68%
1	1	0	6	0	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	31.906.436		0,00%
1	1	0	7			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.040.679.000	352.259.315	33,85%
1	1	0	7	0	5	Pengadaan Mebel	38.824.000	4.056.200	10,45%
1	1	0	7	0	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	501.855.000	348.203.115	69,38%
1	1	0	7	0	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	500.000.000		0,00%
1	1	0	8			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.671.463.884	1.656.717.660	45,12%
1	1	0	8	0	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	34.565.400	10.165.500	29,41%
1	1	0	8	0	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	750.000.000	375.000.000	50,00%
1	1	0	8	0	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.886.898.484	1.271.552.160	44,05%
1	1	0	9			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	287.320.000	139.189.230	48,44%
1	1	0	9	0	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	236.820.000	127.344.930	53,77%
1	1	0	9	0	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.500.000	11.444.300	22,66%
1	1	1	4			Fasilitasi Keprotokolan	20.000.000		0,00%
1	1	1	4	0	1	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	20.000.000		0,00%
0	2					PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	766.082.186.717	215.924.048.955	28,19%
2	2	0	1			Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	9.117.716.177	2.496.853.714	27,38%

NO						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
2	2	0	1	0	1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	409.098.000		0,00%
2	2	0	1	0	2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	407.052.000		0,00%
2	2	0	1	0	5	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD	209.819.000	113.802.987	54,24%
2	2	0	1	0	6	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	430.227.800	196.039.166	45,57%
2	2	0	1	0	7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2.675.048.112		0,00%
2	2	0	1	0	8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	3.023.238.813	1.483.401.112	49,07%
2	2	0	1	0	9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1.963.232.452	703.610.449	35,84%
2	2	0	2			Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	2.035.277.005	536.405.685	26,36%
2	2	0	2	0	2	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	406.438.000		0,00%
2	2	0	2	0	3	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	407.968.000		0,00%
2	2	0	2	0	4	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang	484.694.000	164.987.572	34,04%

NO						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
						Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota			
2	2	0	2	0	5	Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	608.470.500	276.252.695	45,40%
2	2	0	2	0	7	Asistensi Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	41.398.000	32.728.750	79,06%
2	2	0	2	0	12	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah	86.308.505	62.436.668	72,34%
2	2	0	3			Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	1.853.943.796	851.038.391	45,90%
2	2	0	3	0	1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	360.444.296	221.574.139	61,47%
2	2	0	3	0	3	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	256.557.600	108.141.068	42,15%
2	2	0	3	0	5	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	382.648.400	156.878.255	41,00%
2	2	0	3	0	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	509.582.200	292.864.929	57,47%

NO						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
2	2	0	3	0	8	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	344.711.300	71.580.000	20,77%
2	2	0	4			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	2.775.407.652	1.146.738.336	41,32%
2	2	0	4	0	2	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	323.085.212	165.104.790	51,10%
2	2	0	4	0	3	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	675.930.891	291.910.200	43,19%
2	2	0	4	0	4	konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	635.935.249	445.299.359	70,02%
2	2	0	4	0	5	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	1.140.456.300	244.423.987	21,43%
2	2	0	5			Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	750.299.842.087	210.893.012.829	28,11%
2	2	0	5	0	4	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	47.206.923.484		0,00%
2	2	0	5	0	8	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	36.691.308.847		0,00%

NO						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
2	2	0	5	0	9	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	13.149.302.896	725.197.800	5,52%
2	2	0	5	0	10	Pengelolaan Dana bagi Hasil Provinsi	653.252.306.860	210.167.815.029	32,17%

Sumber : SPJ Belanja – Fungsional Juli 2025

B. Kinerja Badan Keuangan Daerah berdasarkan Program dan Kegiatan

Hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang merupakan Kinerja Badan Keuangan Daerah sebagai berikut:

Sampai dengan 31 Juli 2025, hasil pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT terdiri dari 13 kegiatan dan 74 sub kegiatan dimana setiap kegiatan dan sub kegiatan terbagi dalam 2 (dua) program, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Program ini secara teknis menjadi tanggungjawab Sekretariat Badan Keuangan Daerah adapun Pagu sebesar Rp. 20.990.960.988,- Terealisasi sebesar Rp. 8.258.827.309,- dengan presentase (39,34%);

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD

Sub Bagian PDE bertanggungjawab untuk menangani kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Pelaksanaan pengumpulan data statistik sektoral daerah, dan Penyelenggaraan walidata pendukung statistik sektoral daerah. Pagu sebesar Rp. 422.994.096,- Realisasi sebesar Rp. 201.264.717,-(47,58%).Hasil (output) pelaksanaan kegiatan:

- ⇒ Tersusunnya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ).
- ⇒ Tersusunnya LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah).
- ⇒ Terlaksananya Pelaporan Realisasi Keuangan dan fisik serta monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian target RPSMD secara tahunan, pencapaian renstra secara tahunan, dan target indikator secara bulanan dan triwulan kepada Bapperida melalui aplikasi e. Monev performance.
- ⇒ Terlaksananya Beberapa fungsi dari pimpinan berupa:
 - a. Penyusunan materi rapat.
 - b. Mewakili pimpinan untuk mengikuti rapat maupun kegiatan lainnya.
 - c. Tugas-Tugas Lainnya.

b. Sub Kegiatan Administrasi Keuangan

Sub Bagian Keuangan bertanggungjawab menangani kegiatan Administrasi Keuangan Daerah dengan sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD, dan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran. Pagu sebesar Rp. 13.840.365.766,- Realisasi Rp. 5.091.512.059,-(36,79%) Hasil (output) pelaksanaan kegiatan:

- ⇒ Tersusunnya Laporan Realisasi Keuangan.
- ⇒ Terjawabnya temuan Inspektur Jenderal.
- ⇒ SPP/SPM-GU kepada pengguna Anggaran.
- ⇒ SPP/SPM-GU kepada BUD.
- ⇒ SPJ fungsional kepada PPK SKPD untuk divirifikasi.
- ⇒ SPJ Administrasi kepada PPK SKPD untuk divirifikasi.
- ⇒ Pengisian buku cek dan pengembalian tunai uang kas di Bank .

- ⇒ Menerima dan menyimpan uang persediaan .
- ⇒ Membukukan penyetoran atas pungutan Pajak.
- ⇒ Membuat rekapitulasi data realisasi belanja bunga, belanja DBH, bantuan keuangan dan BTT.

c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum bertanggungjawab menangani kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, yang terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan yaitu Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD dan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD. Pagu sebesar Rp. 20.000.000,- Realisasi Rp 4.264.000,- (21,32%). Hasil (output) pelaksanaan kegiatan :

- ⇒ Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah.
- ⇒ Tersusunnya rencana kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD).

d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum bertanggungjawab menangani kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terdiri dari Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian, Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai dan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi. Pagu sebesar Rp. 232.158.000,- Realisasi Rp. 94.921.203,- (40,89%). Hasil (output) pelaksanaan kegiatan :

- ⇒ Tersusunnya Laporan Budaya Kerja.
- ⇒ Penyelesaian Dokumen Kenaikan Pangkat.
- ⇒ Penyelesaian Dokumen Pensiun.
- ⇒ Tersusunnya Laporan Presentasi Kehadiran.
- ⇒ Pengusulan Pensiun.
- ⇒ Penyusunan Laporan Implementasi SPBE Tahun 2023.
- ⇒ Pengusulan Kenaikan Pangkat .
- ⇒ Penginputan Anjab ABK Tahun 2025 Pada Aplikasi Sinjab 3.8.

e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Bagian Keuangan bertanggungjawab menangani kegiatan Administrasi Umum PD yang terdiri dari Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, Penyediaan Bahan/Material, Fasilitas Kunjungan Tamu, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD. Pagu sebesar Rp. 1.455.980.242,- Realisasi Rp. 718.699.125,-(49.36%). Hasil (output) pelaksanaan kegiatan :

- ⇒ Tersedianya Peralatan Rumah Tangga.
- ⇒ Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan.
- ⇒ Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.
- ⇒ Tersedianya Bahan/Material.

f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum bertanggungjawab menangani kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sub Kegiatan Pengadaan Mebel dan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya. Pagu sebesar Rp. 1.040.679.000,-Realisasi Rp.1.656.717.660 , - (45.12%).

g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum bertanggungjawab menangani kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Melebihi Pagu Validasi. Pagu sebesar Rp. 3.671.463.884,- Realisasi Rp. 1.656.717.660,- (45.12%). Hasil (output) pelaksanaan kegiatan:

- ⇒ Tersedianya Jasa Surat Menyurat.

h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum bertanggungjawab menangani kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya, dan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya. Pagu sebesar Rp 287.320.000,- Realisasi Rp. 139.189.230,- (48,44). Hasil (output) pelaksanaan kegiatan :
⇒ Tersedianya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.

2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Program Pengelolaan Keuangan Daerah ditangani oleh 4 Bidang yaitu Bidang Anggaran, Bidang Pembinaan Keuangan Kabupaten/Kota, Bidang Perbendaharaan dan Bidang Akuntansi dan Pelaporan. Dari pagu sebesar Rp. 766.082.186.717,- Realisasi Rp. 215.924.048.955,- Presentase (28,19%). Berikut adalah realisasi kinerja per kegiatan :

a. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah

Kegiatan ini ditangani oleh Bidang Anggaran dengan Pagu sebesar Rp. 9.117.716.177,- Realisasi Rp. 2.496.853.714,- (12,32%). Hasil (output) pelaksanaan kegiatan :

1. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD;
2. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD;
3. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran;
4. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS;

5. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD;
6. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS;
7. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA;
8. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD.
9. Konsultasi terkait Pergeseran Anggaran Biro Pengadaan Barang Dan Jasa;
10. Konsultasi terkait Analisis Standar Belanja (Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT);
11. Konsultasi terkait Satuan Standar Harga (Badan Pendapatan dan Aset Daerah).
12. Konsultasi terkait Pemberian TPP (Biro Pengadaan Barang Dan Jasa);
13. Konsultasi terkait Perubahan Anggaran SKPD (Satuan Polisi Pamong Praja);
14. Konsultasi terkait Pelatihan Tenaga Kesehatan (UPTD Pelatihan Tenaga Kesehatan);
15. Konsultasi terkait Gaji 13 (Dinas KetenagaKerjaan dan Transmigrasi);
16. Konsultasi terkait SPD pada SIPD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa);
17. Konsultasi terkait RKA dan Pergeseran Anggaran ke 2 (Dinas petenakan).

Tabel 3.10

Hasil Pelaksanaan Bidang Anggaran Badan Keuangan Daerah
Kondisi 31 Juli 2025

Program	Rincian Kegiatan	Target (dokumen/kegiatan /buku)	Realisasi (dokumen/kegiatan /buku)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Koordinasi penyusunan dan verifikasi Dokumen Perubahan DPA-SKPD TA. 2025	- Proses Pencetakan Dokumen Perubahan Kedua DPA-SKPD TA. 2025	Dokumen Perubahan Kedua DPA-SKPD TA. 2025	Terealisasi
	2. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBD	- Rapat terkait usulan pergeseran dan pengguguran tanda bintang rincian belanja dari SKPD	Pembahasan ini sudah dilaksanakan	Terealisasi
		- Rapat terkait Kewajiban Utang Belanja Perangkat Daerah Sesuai Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah TA. 2024	Pembahasan ini sudah dilaksanakan	Terealisasi
		- Rapat terkait Pembahasan	Pembahasan ini	Terealisasi

		pelaksanaan pekerjaan fisik ruas jalan wolowona – Ndonga (Keuskupan ende) dan ruas jalan ndonga – sokoria (PLTP Sokoria)	sudah dilaksanakan	
		- Rapat terkait Pembahasan Perubahan Pra RKA SKPD TA. 2025	Pembahasan ini sudah dilaksanakan	Terealisasi
	3. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD	- Rapat terkait Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS Tahun 2026 oleh Gubernur kepada DPRD	Pembahasan ini sudah dilaksanakan	Terealisasi
		- Rapat terkait penyampaian Rencana target PAD Tahun 2026, Penyesuaian kembali RKPD Tahun 2026 dan Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS Tahun 2026	Pembahasan ini sudah dilaksanakan	Terealisasi
		- Rapat terkait Pembahasan penyusunan kebijakan TPP Tahun 2026	Pembahasan ini sudah dilaksanakan	Terealisasi
		- Rapat terkait Persiapan pembahasan di komisi terkait Rancangan KUA dan Rancangan PPAS TA. 2026	Pembahasan ini sudah dilaksanakan	Terealisasi

		- Rapat terkait Persiapan pembahasan di komisi terkait Rancangan KUA dan Rancangan PPAS TA. 2026	Pembahasan ini sudah dilaksanakan	Terealisasi
		- Rapat terkait Pembahasan penyusunan kebijakan Pemberian Insentif bagi para tenaga Kesehatan dalam Skema TPP Tahun 2026	Pembahasan ini sudah dilaksanakan	Terealisasi
		- Rapat Paripurna terkait Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS Tahun 2026	Pembahasan ini sudah dilaksanakan	Terealisasi
		- Proses Pencetakan Dokumen Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) Provinsi NTT Tahun Anggaran 2026	Dokumen Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) Provinsi NTT Tahun Anggaran 2026	Terealisasi
		- Proses Pencetakan Dokumen Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Provinsi NTT Tahun Anggaran 2026	Dokumen Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Provinsi NTT Tahun Anggaran 2026	Terealisasi
		- Proses Pencetakan Dokumen Sambutan Gubernur Nusa Tenggara Timur pada Rapat Paripurna DPRD dengan Agenda Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS TA. 2026	Dokumen Sambutan Gubernur Nusa Tenggara Timur	Terealisasi

b. Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini ditangani oleh Bidang Pembinaan Keuangan Kabupaten/Kota dengan Pagu sebesar Rp. 2.035.277.005,- Realisasi Rp. 536.405.685,- (26,36%). Hasil (output) pelaksanaan kegiatan dijelaskan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.11

Hasil Pelaksanaan Bidang Pembinaan Keuangan Kabupaten/Kota Badan Keuangan Daerah Kondisi 31 Juli 2025

NO	PROGRAM/ KEGIATAN /RINCIAN KERJA	BENTUK/ WUJUD	REALISASI	KETERANGAN
PROGRAM : PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				
KEGIATAN : PEMBINAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)
A.	Sub kegiatan : Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kab/Kota dengan rincian kegiatan sebagai berikut :			Kegiatan akan dilaksanakan pada bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2025
B.	Sub kegiatan : Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota			Kegiatan akan dilaksanakan pada bulan Juli sampai dengan Oktober 2025

C.	Sub kegiatan : Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dengan rincian kegiatan sebagai berikut :			Kegiatan akan dilaksanakan pada bulan Mei sampai dengan Agustus 2025
	1.Pengecekan dan Inventarisir hard copy dan soft Copy dokumen RAPBD, Rancangan Perbup APBD Kabupaten Manggarai Timur serta Dokumen Pendukung Tahun Anggaran 2024	RAPBD, Rancangan Perbup APBD Kabupaten Manggarai Timur serta Dokumen Pendukung Tahun Anggaran 2024	RAPBD, Rancangan Perbup APBD Kabupaten Manggarai Timur serta Dokumen Pendukung Tahun Anggaran 2024 lengkap dan andal	
	2.Penyiapan Materi Evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 Kabupaten Manggarai Timur	Materi Evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 Kabupaten Manggarai Timur	Adanya Materi Evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 Kabupaten Manggarai Timur	
	3.Rapat Evaluasi RAPBD, Rancangan Perbup APBD Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2024	Rapat Evaluasi RAPBD, Rancangan Perbup APBD Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran	SK Gubernur NTT Nomor 900/112/BKUD5/2025 Tanggal 3 Juli 2025 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan	Rapat Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan

		2024	Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Manggarai Barat TA 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Manggarai Barat Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024	APBD Tahun Anggaran 2024 dilaksanakan pada hari Selasa, 1 Juli 2024
	4.Pengecekan dan Inventarisir hard copy dan soft Copy dokumen RAPBD, Rancangan Perbup APBD Kabupaten Manggarai Timur serta Dokumen Pendukung Tahun Anggaran 2024	RAPBD, Rancangan Perbup APBD Kabupaten Manggarai Timur serta Dokumen Pendukung Tahun Anggaran 2024	RAPBD, Rancangan Perbup APBD Kabupaten Manggarai Timur serta Dokumen Pendukung Tahun Anggaran 2024 lengkap dan andal	Pengecekan dokumen dilaksanakan pada hari Rabu, 2 Juli 2025
	5.Pengecekan dan Inventarisir hard copy dan soft Copy dokumen RAPBD, Rancangan Perbup APBD Kabupaten Sabu Raijua serta Dokumen Pendukung Tahun Anggaran 2024	RAPBD, Rancangan Perbup APBD Kabupaten Sabu Raijua serta Dokumen Pendukung Tahun Anggaran 2024	RAPBD, Rancangan Perbup APBD Kabupaten Sabu Raijua serta Dokumen Pendukung Tahun Anggaran 2024 lengkap dan andal	Pengecekan dokumen dilaksanakan pada hari Senin, 7 Juli 2025
	6.Pengecekan dan Inventarisir hard copy dan soft Copy dokumen RAPBD, Rancangan Perbup APBD Kabupaten Sumba Barat Daya serta Dokumen Pendukung	RAPBD, Rancangan Perbup APBD Kabupaten Sumba Barat Daya serta Dokumen Pendukung Tahun	RAPBD, Rancangan Perbup APBD Kabupaten Sumba Barat Daya serta Dokumen Pendukung Tahun Anggaran 2024 lengkap dan andal	Pengecekan dokumen dilaksanakan pada hari Senin, 7 Juli 2025

	Tahun Anggaran 2024	Anggaran 2024		
	7. Pengecekan dan Inventarisir hard copy dan soft Copy dokumen RAPBD, Rancangan Perbup APBD Kota Kupang serta Dokumen Pendukung Tahun Anggaran 2024	RAPBD, Rancangan Perbup APBD Kota Kupang serta Dokumen Pendukung Tahun Anggaran 2024	RAPBD, Rancangan Perbup APBD Kota Kupang serta Dokumen Pendukung Tahun Anggaran 2024 lengkap dan andal	Pengecekan dokumen dilaksanakan pada hari Senin, 7 Juli 2025
	8. Pengecekan dan Inventarisir hard copy dan soft Copy dokumen RAPBD, Rancangan Perbup APBD Kabupaten Sumba Tengah serta Dokumen Pendukung Tahun Anggaran 2024	RAPBD, Rancangan Perbup APBD Kabupaten Sumba Tengah serta Dokumen Pendukung Tahun Anggaran 2024	RAPBD, Rancangan Perbup APBD Kabupaten Sumba Tengah serta Dokumen Pendukung Tahun Anggaran 2024 lengkap dan andal	Pengecekan dokumen dilaksanakan pada hari Rabu, 16 Juli 2025
	9. Pengecekan dan Inventarisir hard copy dan soft Copy dokumen RAPBD, Rancangan Perbup APBD Kabupaten Manggarai serta Dokumen Pendukung Tahun Anggaran 2024	RAPBD, Rancangan Perbup APBD Kabupaten Manggarai serta Dokumen Pendukung Tahun Anggaran 2024	RAPBD, Rancangan Perbup APBD Kabupaten Manggarai serta Dokumen Pendukung Tahun Anggaran 2024 lengkap dan andal	Pengecekan dokumen dilaksanakan pada hari Rabu, 16 Juli 2025
	10. Pengecekan dan Inventarisir hard copy dan soft Copy dokumen RAPBD, Rancangan Perbup APBD Kabupaten Lembata serta Dokumen Pendukung Tahun Anggaran 2024	RAPBD, Rancangan Perbup APBD Kabupaten Lembata serta Dokumen Pendukung Tahun Anggaran 2024	RAPBD, Rancangan Perbup APBD Kabupaten Lembata serta Dokumen Pendukung Tahun Anggaran 2024 lengkap dan andal	Pengecekan dokumen dilaksanakan pada hari Jumat, 18 Juli 2025
	11. Pengecekan dan	RAPBD,	RAPBD, Rancangan	Pengecekan

	Inventarisir hard copy dan soft Copy dokumen RAPBD, Rancangan Perbup APBD Kabupaten Belu serta Dokumen Pendukung Tahun Anggaran 2024	Rancangan Perbup APBD kabupaten Belu serta Dokumen Pendukung Tahun Anggaran 2024	Perbup APBD Kabupaten Belu serta Dokumen Pendukung Tahun Anggaran 2024 lengkap dan andal	dokumen dilaksanakan pada hari Senin, 21 Juli 2025
	12. Pengecekan dan Inventarisir hard copy dan soft Copy dokumen RAPBD, Rancangan Perbup APBD Kabupaten Flores Timur serta Dokumen Pendukung Tahun Anggaran 2024	RAPBD, Rancangan Perbup APBD Kabupaten Flores Timur serta Dokumen Pendukung Tahun Anggaran 2024	RAPBD, Rancangan Perbup APBD Kabupaten Flores Timur serta Dokumen Pendukung Tahun Anggaran 2024 lengkap dan andal	Pengecekan dokumen dilaksanakan pada hari Senin, 21 Juli 2025
	13. Pengecekan dan Inventarisir hard copy dan soft Copy dokumen RAPBD, Rancangan Perbup APBD Kabupaten Ngada serta Dokumen Pendukung Tahun Anggaran 2024	RAPBD, Rancangan Perbup APBD Kabupaten Ngada serta Dokumen Pendukung Tahun Anggaran 2024	RAPBD, Rancangan Perbup APBD Kabupaten Ngada serta Dokumen Pendukung Tahun Anggaran 2024 lengkap dan andal	Pengecekan dokumen dilaksanakan pada hari Selasa, 22 Juli 2025
	14. Pengecekan dan Inventarisir hard copy dan soft Copy dokumen RAPBD, Rancangan Perbup APBD Kabupaten TTU serta Dokumen Pendukung Tahun Anggaran 2024	RAPBD, Rancangan Perbup APBD Kabupaten TTU serta Dokumen Pendukung Tahun Anggaran 2024	RAPBD, Rancangan Perbup APBD Kabupaten TTU serta Dokumen Pendukung Tahun Anggaran 2024 lengkap dan andal	Pengecekan dokumen dilaksanakan pada hari Senin, 28 Juli 2025
	15. Penyiapan Materi Evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Materi Evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun	Adanya Materi Evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024	Materi disusun pada saat dokumen telah disampaikan

	Tahun Anggaran 2024 Kabupaten Manggarai Timur	Anggaran 2024 Kabupaten Manggarai Timur	Kabupaten Manggarai Timur	kepada Badan Keuangan Provinsi Nusa Tenggara Timur
	16.Penyiapan Materi Evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 Kabupaten Kabupaten Sabu Raijua	Materi Evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 Kabupaten Kabupaten Sabu Raijua	Adanya Materi Evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 Kabupaten Kabupaten Sabu Raijua	Materi disusun pada saat dokumen telah disampaikan kepada Badan Keuangan Provinsi Nusa Tenggara Timur
	17.Penyiapan Materi Evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 Kabupaten Sumba Barat Daya	Materi Evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 Kabupaten Sumba Barat Daya	Adanya Materi Evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 Kabupaten Sumba Barat Daya	Materi disusun pada saat dokumen telah disampaikan kepada Badan Keuangan Provinsi Nusa Tenggara Timur
	18.Penyiapan Materi Evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 Kota Kupang	Materi Evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 Kota Kupang	Adanya Materi Evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 Kota Kupang	Materi disusun pada saat dokumen telah disampaikan kepada Badan Keuangan Provinsi Nusa Tenggara Timur
	19.Penyiapan Materi Evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 Kabupaten Sumba Tengah	Materi Evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 Kabupaten	Adanya Materi Evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 Kabupaten Sumba Tengah	Materi disusun pada saat dokumen telah disampaikan kepada Badan Keuangan Provinsi Nusa

		Sumba Tengah		Tenggara Timur
	20.Penyiapan Materi Evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 Kabupaten Manggarai	Materi Evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 Kabupaten Manggarai	Adanya Materi Evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 Kabupaten Manggarai	Materi disusun pada saat dokumen telah disampaikan kepada Badan Keuangan Provinsi Nusa Tenggara Timur
	21.Penyiapan Materi Evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 Kabupaten Lembata	Materi Evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 Kabupaten Lembata	Adanya Materi Evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 Kabupaten Lembata	Materi disusun pada saat dokumen telah disampaikan kepada Badan Keuangan Provinsi Nusa Tenggara Timur
	22.Penyiapan Materi Evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 Kabupaten Belu	Materi Evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 Kabupaten Belu	Adanya Materi Evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 Kabupaten Belu	Materi disusun pada saat dokumen telah disampaikan kepada Badan Keuangan Provinsi Nusa Tenggara Timur
	23.Penyiapan Materi Evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 Kabupaten Flores Timur	Materi Evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 Kabupaten Flores Timur	Adanya Materi Evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 Kabupaten Flores Timur	Materi disusun pada saat dokumen telah disampaikan kepada Badan Keuangan Provinsi Nusa Tenggara Timur
	24.Penyiapan Materi Evaluasi	Materi Evaluasi Pertanggungjawaban	Adanya Materi Evaluasi Pertanggungjawaban	Materi disusun pada saat

	Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 Kabupaten Ngada	an Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 Kabupaten Ngada	Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 Kabupaten Ngada	dokumen telah disampaikan kepada Badan Keuangan Provinsi Nusa Tenggara Timur
	25.Penyiapan Materi Evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 Kabupaten TTU	Materi Evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 Kabupaten TTU	Adanya Materi Evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 Kabupaten TTU	Materi disusun pada saat dokumen telah disampaikan kepada Badan Keuangan Provinsi Nusa Tenggara Timur
	26.Rapat Evaluasi RAPBD, Rancangan Perbup APBD Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2024	Rapat Evaluasi RAPBD, Rancangan Perbup APBD Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2024	SK Gubernur NTT Nomor 900/113/BKUD5/2025 Tanggal 10 Juli 2025 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Manggarai Timur TA 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Manggarai Timur Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024	Rapat Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dilaksanakan pada hari Senin, 7 Juli 2025
	27.Rapat Evaluasi RAPBD, Rancangan Perbup APBD Kabupaten Sabu Raijua	Rapat Evaluasi RAPBD, Rancangan Perbup	SK Gubernur NTT Nomor 900/114/BKUD5/2025	Rapat Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah

	Tahun Anggaran 2024	APBD Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2024	Tanggal 11 Juli 2025 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Sabu Raijua TA 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Sabu Raijua Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024	tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dilaksanakan pada hari Selasa, 8 Juli 2025
	28.Rapat Evaluasi RAPBD, Rancangan Perbup APBD Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2024	Rapat Evaluasi RAPBD, Rancangan Perbup APBD Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2024	SK Gubernur NTT Nomor 900/115/BKUD5/2025 Tanggal 14 Juli 2025 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Sumba Barat Daya TA 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Sumba Barat Daya Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024	Rapat Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dilaksanakan pada hari Jumat 7 Juli 2025
	29.Rapat Evaluasi RAPBD, Rancangan Perbup APBD Kota Kupang Tahun	Rapat Evaluasi RAPBD, Rancangan Perbup	SK Gubernur NTT Nomor 900/116/BKUD5/2025	Rapat Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah

	Anggaran 2024	APBD Kota Kupang Daya Tahun Anggaran 2024	Tanggal 15 Juli 2025 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Kupang TA 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Sumba Barat Daya Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024	tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dilaksanakan pada hari Senin, 14 Juli 2025
	30.Rapat Evaluasi RAPBD, Rancangan Perbup APBD Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2024	Rapat Evaluasi RAPBD, Rancangan Perbup APBD Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2024	SK Gubernur NTT Nomor 900/122/BKUD5/2025 Tanggal 21 Juli 2025 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Sumba Tengah TA 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Sumba Tengah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024	Rapat Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dilaksanakan pada hari Kamis, 17 Juli 2025
	31.Rapat Evaluasi RAPBD, Rancangan Perbup APBD Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2024	Rapat Evaluasi RAPBD, Rancangan Perbup APBD Kabupaten	SK Gubernur NTT Nomor 900/123/BKUD5/2025 Tanggal 21 Juli 2025	Rapat Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang

		Manggarai Tahun Anggaran 2024	2025 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Manggarai TA 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Sumba Tengah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024	Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dilaksanakan pada hari Jumat, 18 Juli 2025
	32.Rapat Evaluasi RAPBD, Rancangan Perbup APBD Kabupaten LembataTahun Anggaran 2024	Rapat Evaluasi RAPBD, Rancangan Perbup APBD Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2024	SK Gubernur NTT Nomor 900/126/BKUD5/2025 Tanggal 25 Juli 2025 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Lembata TA 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Sumba Tengah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024	Rapat Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dilaksanakan pada hari Rabu, 23 Juli 2025
	33.Rapat Evaluasi RAPBD, Rancangan Perbup APBD Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2024	Rapat Evaluasi RAPBD, Rancangan Perbup APBD Kabupaten	SK Gubernur NTT Nomor 900/127/BKUD5/2025 Tanggal 28 Juli 2025	Rapat Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang

		Belu Tahun Anggaran 2024	tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Belu TA 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Belu Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024	Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dilaksanakan pada hari Kamis, 24 Juli 2025
	34.Rapat Evaluasi RAPBD, Rancangan Perbup APBD Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2024	Rapat Evaluasi RAPBD, Rancangan Perbup APBD Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2024	SK Gubernur NTT Nomor 900/128/BKUD5/2025 Tanggal 28 Juli 2025 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Flores Timur TA 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Lembata Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024	Rapat Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dilaksanakan pada hari Jumat, 25 Juli 2025
	35.Rapat Evaluasi RAPBD, Rancangan Perbup APBD Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2024	Rapat Evaluasi RAPBD, Rancangan Perbup APBD Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2024	SK Gubernur NTT Nomor 900/132/BKUD5/2025 Tanggal 29 Juli 2025 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan	Rapat Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan

			Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Ngada TA 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Ngada Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024	APBD Tahun Anggaran 2024 dilaksanakan pada hari Jumat, 25 Juli 2025
	36.Rapat Evaluasi RAPBD, Rancangan Perbup APBD Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2024	Rapat Evaluasi RAPBD, Rancangan Perbup APBD Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2024	SK Gubernur NTT Nomor 900/144/BKUD5/2025 Tanggal 4 Agustus 2025 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Sabu Raijua Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024	Rapat Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dilaksanakan pada hari Kamis, 31 Juli 2025
D.	Sub kegiatan : Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota dengan rincian kegiatannya yaitu Rapat Koordinasi Keuangan Daerah			Kegiatan akan dilaksanakan pada bulan Mei 2025

	1. Sub kegiatan : Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasi Laporan Keuangan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah dengan rincian kegiatan sebagai berikut :			
	2. Rekapitulasi Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada 22 Kabupaten/Kota	List rekapan LRA Kabupaten/Kota keadaan sampai dengan 4 Juli 2025 sebanyak 1 (satu) dokumen dan dilanjutkan setiap minggu	1 (satu) list rekapan LRA Kabupaten/Kota dan telah dikirimkan kepada Kemendagri, Bank Indonesia dan Kanwil Perbendaharaan Provinsi NTT serta Kantor DJP Pajak Pratama	Berlanjut untuk LRA 11 Juli Tahun 2025 yang akan dilaporkan setiap Minggu
	3. Rekapitulasi Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada 22 Kabupaten/Kota	List rekapan LRA Kabupaten/Kota keadaan sampai dengan 11 Juli 2025 sebanyak 1 (satu) dokumen dan dilanjutkan setiap minggu	1 (satu) list rekapan LRA Kabupaten/Kota dan telah dikirimkan kepada Kemendagri, Bank Indonesia dan Kanwil Perbendaharaan Provinsi NTT serta Kantor DJP Pajak Pratama	Berlanjut untuk LRA 18 Juli Tahun 2025 yang akan dilaporkan setiap Minggu

	4. Rekapitulasi Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada 22 Kabupaten/Kota	List rekapitan LRA Kabupaten/Kota keadaan sampai dengan 18 Juli 2025 sebanyak 1 (satu) dokumen dan dilanjutkan setiap minggu	1 (satu) list rekapitan LRA Kabupaten/Kota dan telah dikirimkan kepada Kemendagri, Bank Indonesia dan Kanwil Perbendaharaan Provinsi NTT serta Kantor DJP Pajak Pratama	Berlanjut untuk LRA 25 Juli Tahun 2025 yang akan dilaporkan setiap Minggu
	5. Rekapitulasi Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada 22 Kabupaten/Kota	List rekapitan LRA Kabupaten/Kota keadaan sampai dengan 25 Juli 2025 sebanyak 1 (satu) dokumen dan dilanjutkan setiap minggu	1 (satu) list rekapitan LRA Kabupaten/Kota dan telah dikirimkan kepada Kemendagri, Bank Indonesia dan Kanwil Perbendaharaan Provinsi NTT serta Kantor DJP Pajak Pratama	Berlanjut untuk LRA bulan berikutnya Tahun 2025 yang akan dilaporkan setiap Minggu di bulan depan
	6. Menyusun Data Statistik Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2023	Draf daftar/list Data Statistik Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2023.	Draf data Statistik Keuangan Daerah tahun 2023	Berlanjut untuk bulan-bulan berikutnya
E.	Sub kegiatan : Asistensi Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota			Telah selesai dilaksanakan pada bulan Februari 2025
F.	Asistensi Pengelolaan Keuangan DBH-CHT Kab/Kota			
	1. Penyusunan Surat Gubernur Nusa Tenggara	Surat Gubernur Nusa Tenggara	Terinformasinya laporan DBH CHT	

	Timur kepada Para Bupati dan Walikota se-Nusa Tenggara Timur Nomor 900.1.14/1443/BKUD5.2 Tanggal 14 Juli 2025 Tentang Permintaan Laporan DBH CHT semester 1 Tahun Anggaran 2025	Timur kepada Para Bupati dan Walikota se-Nusa Tenggara Timur Nomor 900.1.14/1443/BKUD5.2 Tanggal 14 Juli 2025 Tentang Permintaan Laporan DBH CHT Tembakau semester 1 Tahun Anggaran 2025	semester 1 Tahun Anggaran 2025 dari 21 kabupaten/kota tersisa 1 kabupaten yakni kabupaten Ngada	
G.	Sub kegiatan : Pelaksanaan Kegiatan Umum dengan rincian kegiatan sebagai berikut :			
	1. Penyusunan laporan kegiatan bulan Juli 2025	Laporan kegiatan kegiatan bulan Juli 2025	Disampaikannya laporan kegiatan bidang pembinaan kab/kota bulan Juli 2025 kepada Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Berlanjut Laporan kegiatan bulan Agustus yang dilaporkan di bulan September
	2. Penyusunan Laporan Bimbingan Teknis Penyelarasan KUA PPAS berdasarkan KEM PPKF yang difasilitasi oleh SKALA	Laporan Bimbingan Teknis Penyelarasan KUA PPAS berdasarkan KEM PPKF yang difasilitasi oleh SKALA	Terinformasinya Pelaksanaan bimbingan Teknis Penyelarasan KUA PPAS berdasarkan KEM PPKF yang difasilitasi oleh SKALA dengan di ikuti oleh Peserta dari 22 Kabupaten/kota yang terdiri dari 1 (satu) orang peserta dari BAPPEDA/BAPELITBA	Kegiatan telah selesai dilaksanakan pada hari Senin, 30 Juni 2025 di sabu rajua room hotel Harper Kota Kupang

			NGDA/ BAPPERINDA dan 1 (satu) orang dari Badan Keuangan Daerah/BPKAD. Narasumber pada kegiatan bimbingan teknis tersebut yakni: Pejabat dari Kementerian Keuangan, Pejabat dari Kementerian Dalam Negeri dan arahan umum dari Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur serta Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	
	3. Pelaksanaan Rapat konsultasi dan koordinasi dari Kabupaten/Kota yakni: 1. Pemerintah kabupaten Kupang terkait keterlambatan pelaksanaan sidang DPRD pada Rancangan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 Kabupaten Kupang. Terkait Pengelolaan Keuangan Daerah, Kabupaten Flores Timur terkait Kartu Kredit	Rapat konsultasi dan koordinasi dari Pemerintah kabupaten Kupang dan Kabupaten TTU	Terinformasinya berbagai hal terkait Pengelolaan Keuangan Daerah	Rapat Konsultasi dari Sekretaris Badan Keuangan Kab. TTU Hari Kamis, Tanggal 10 Juli 2025, di Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT

Pemerintah Daerah.			
2. Pemerintah kabupaten			
TTU terkait Tahun			
Anggaran 2024			
Kabupaten Kupang.			
Terkait Kendala			
penyampaian laporan			
realisasi DBH CHT,			
mekanisme			
penyampaian dan			
penilaian dokumen KUA			
PPAS berbasis KEM			
PPKF dan Perencanaan			
belanja yang bersumber			
dari SILPA Tahun			
sebelumnya.			

c. Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

Kegiatan ini ditangani oleh Bidang Perbendaharaan dengan Pagu sebesar Rp. 1.853.943.796,- Realisasi Rp. 851.038.391,- (45,90%). Hasil (output) pelaksanaan kegiatan dijelaskan dalam tabel berikut ini:

1. Selaku Bendahara Umum Daerah (BUD)

Saldo awal Rp. 549.269.330.984 realisasi Penerimaan sebesar Rp.530.268.918.784 sedangkan Realisasi Pengeluaran sebesar Rp.550.650.936.301,- dan sisa saldo RKUD per 31 Juli 2025 sebesar Rp.528.887.313.467

2. Saldo Deposito Rp. 175.000.000.000,- dengan perincian sebagai berikut:

- Bank BNI Rp. 60.000.000.000,-
- Bank BRI Rp. 60.000.000.000,-
- Bank Mandiri Rp. 35.000.000.000,-
- Bank NTT Rp. 20.000.000.000,-

3. Realisasi Keuangan khusus Bidang Perbendaharaan dengan anggaran sebesar Rp.1.853.943.796,- terealisasi Rp. 550.381.236,- atau 30 % yang terdiri dari:
- a. Sub Kegiatan 02.1.03.0001 Koordinasi dan pengelolaan Kas Daerah terealisasi Rp. 215.556.339,- atau 60 % dari anggaran sebesar Rp.360.444.296,-
 - b. Sub Kegiatan 02.1.03.0003 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD terealisasi Rp. 71.340.968,- atau 28 % dari anggaran sebesar Rp.256.557.600,-
 - c. Sub Kegiatan .02.1.03.0005 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer lainnya anggaran sebesar Rp.382.648.400,-
 - d. Sub Kegiatan 02.1.03.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah terealisasi Rp. 214.883.929,- atau 42 % dari anggaran sebesar Rp.509.582.200,-
 - e. Sub Kegiatan 02.1.03.0008 Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang timbul akibat pengelolaan kas, pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas anggaran sebesar Rp.48.600.000,- atau 14% anggaran sebesar Rp. 344.711.300

Tabel 3.12

Hasil Pelaksanaan Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan Daerah
Kondisi 31 Juli 2025

PROGRAM	KEGIATAN	BENTUK/WUJUD	REALISASI	KET
Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Menerima, memverifikasi dan memproses SPP/SPM dari Perangkat Daerah (PD) Lingkup Pemprov. NTT dan selanjutnya diproses menjadi SP2D.	Belanja Daerah Terdiri Dari SP2D : 410 Doc LS Gaji PNSD 72 Doc & Guru (Gaji Induk) LS Terusan gaji 8 Doc LS Krg Tj. 1 Doc Fungsional LS Gaji 36 Doc Susulan LS Gaji PPPK 59 Doc LS Gaji 1 Doc Susulan PPPK LS Tj. Profesi 1 Doc Guru LS Tj. Profesi 1 Doc Guru PPPK LS Belanja 1 Doc Transfer LS Modal 28 Doc GU 36 Doc TU 2 Doc LS TPP 41 Doc LS Susulan 2 Doc TPP LS TPP Purna 22 Doc Bhakti LS TPP PPPK 3 Doc LS Honorer 26 Doc LS DPRD 5 Doc LS Barang dan 65 Doc Jasa	
		Membuat Laporan Bulanan tentang : Data Belanja Gaji Pegawai dan TPP Bulan Juni Tahun Anggaran 2025 untuk Perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU)	SuratPengantar : 1. 900.1/1373/BKUD3.1 Tgl. 07 Juli 2025	

		Data Belanja Gaji PPPK dan TPP Bulan Juni Tahun Anggaran 2025 untuk Perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU) Ke Menteri Keuangan Republik Indonesia c.q Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK)		
		Membuat SKPP (Pensiun BUP, Pensiun Dini, Janda Duda dan Pindah)	SKPP BUP Doc : 36 Doc SKPP : 2 Doc Meninggal SKPP pindah : 2 Doc Pensiun Dini : 1 Doc	
		Menginput Perubahan data Gaji PNSD dan Guru SMA/SMK se Prov. NTT	Perubahan Gaji, Berkala/Naik Pangkat: PNS (SKPD) : 1.560 Orang PNS Guru : 326 Orang PPPK Tahap I : 7 Orang PPPK Tahap II : 6 Orang PPPK P1 : 5 Orang	
		Pembayaran Gaji Rutin Bulanan bagi PNS Lingkup Pemprov. NTT TA. 2025	- Verifikasi berkas - Penginputan data dalam Aplikasi SIM Gaji Taspen - Pencetakan Daftar Gaji - Pencetakan SP2D - Realisasi Pembayaran	
		Mengentri Buku Bantu Rekening Kas Daerah Provinsi NTT	Penerimaan : 4.604 Doc Pengeluaran : 410 Doc	

		Menginput Data Bukti Setoran dan SP2D dalam B IX	8.604 Doc	
		Melakukan Rekapitulasi dan penyetoran PFK (Perhitungan Fihak Ketiga), yang terdiri dari beras, Taspen, Iuran Kesehatan, Iuran Ketenaga kerjaan, PPh Ps. 21, Taperum, PPN dan PPh Ps. 22	PNS pada 41 OPD Lingkup Pemprov. NTT,OPD Pengalihan 3 Kab/Kota dan Guru SMA/SMK Pengalihan 22 Kab/Kota	
		Melakukan verifikasi terhadap SP2D yang akan dilakukan pencairan	410 SP2D	
		Melakukan pengiriman Daftar Transaksi Harian (DTH) dan Rekapitulasi Transaksi Harian (RTH) Bulan Juni 2025 ke KPP Pratama Kupang KPPN Kupang	Surat Pengantar Nomor : 067/1363/BKUD3.3/2025 Tanggal 07 Juli 2025 067/1364/BKUD3.3/2025 Tgl. 07 Juli 2025	
		Melakukan pengiriman Daftar Transaksi Harian (DTH) dan Rekapitulasi Transaksi Harian (RTH) Bulan Juni 2025 ke KPP Pratama Kupang KPPN Kupang	Surat Pengantar Nomor : 067/1363/BKUD3.3/2025 Tanggal 07 Juli 2025 067/1364/BKUD3.3/2025 Tgl. 07 Juli 2025	
		Melakukan Pengiriman Daftar Rekapitulasi, bukti billing iuran wajib pegawai dan bukti billing iuran asuransi	Surat Pengantar Nomor : 1. 067/1339/BKUD3.3/2025 2. 067/1340/BKUD3.3/2025 3. 067/1341/BKUD3.3/2025 Tgl . 03 Juli 2025 1. 900.1/1342/BKUD3/2025	

		kesehatan bulan Juni 2025 (BPJS) TASPEN	2. 900.1/1343/BKUD3/2025 Tgl. 03 Juli 2025	
	Pengagendaan Surat	Surat Masuk Surat Keluar	Total = 190 Surat Total = 39 Surat	
		Melakukan pengiriman bukti pembayaran beras ke Bulog Bulan Februari 2025	33 Setoran	
		Rekapitulasi LHP BPK RI dan Inspektorat Daerah Prov. NTT Keadaan Juli 2025	LHP BPK RI (23 kasus) Nominal Rp. 27.442.586,- LHP Inspektorat Daerah Prov. NTT (12 kasus) Nominal Rp. 1.636.365.431,- Kelebihan Tj. Keluarga PNS Model C (88 Kasus) Nominal Rp. 792.386.844,- Rincian terlampir	
		Melakukan Konfirmasi Dana Pusat Melalui Lembar Konfirmasi Transfer (LKT) Bulan Juni 2025 Ke: 1. Direktorat Pembiayaan dan Kapasitas Daerah, Gedung Radius Prawiro Jakarta 2. Kepala KPPN Cabang Kupang	Surat Pengantar Nomor: 1. 900.1/1320/BKUD3/2025 2. 900.1/1321/BKUD3/2025 Tgl 02 Juli 2025	
		Penginputan perubahan gaji tanggal 1-10 setiap bulannya	Tepat waktu	

		pada SIM Gaji Web		
		Operator pada Aplikasi Gaji melakukan Print daftar gaji	Untuk dibayarkan pada gaji bulan Juli	
		Pelaporan DAU harus di upload melalui aplikasi SINERGI (sofcopy & hardcopy) yang sudah ditandatangani dan cap basah oleh pejabat yang berwenang, pengiriman paling lambat tanggal 14 setiap	Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur tidak pernah terlambat menyampaikan laporan DAU	
		bulannya. Apabila tidak dipenuhi maka penyampaian DAU bulan berikutnya di tunda		
		Penyusunan Laporan Progres Penyerapan Dana Pinjaman Ekonomi (PEN) Daerah antara PT. SMI dan Pemprov. NTT yang dikirim paling lambat setiap tanggal 10 setiap bulannya dan laporan tersebut harus terlebih dahulu sudah di reviu oleh Inspektorat daerah sebelum dikirim ke PT. SMI melalui aplikasi REVINA	Selalu tepat waktu	

	Pembinaan Bendahara	Membuat surat keputusan Gubernur tentang: Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 900/120/BKUD3/2025 tentang Perubahan Ketiga atas lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 900/249/BKUD3/2025 tentang Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pada Organisasi Perangkat Daerah Prov. NTT T.A 2025	Nomor: 900/109/BKUD3/2025 Tgl. 20 Juni 2025	
		Membuat Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 900/121/BKUD3/2025 tentang : Penetapan Nomor Rekening Kas Umum Daerah, Rekening Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Rekening Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Prov. NTT T.A 2025	Nomor : 900/121/BKUD3/2025 Tgl 17 Juli 2025	

d. Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

Kegiatan ini ditangani oleh Bidang Akuntansi dan Pelaporan dengan Pagu sebesar Rp. 2.775.407.652,- Realisasi Rp 1.146.738.336,- (41,32%) . Hasil (output) pelaksanaan kegiatan:

1. DAP Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT TA. 2025

Program Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan kegiatan koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah yang terdiri dari sub – sub kegiatan antara lain :

- a. Sub kegiatan rekonsiliasi dan verifikasi aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, pembiayaan, pendapatan-lo, dan beban jumlah anggaran sebesar Rp. 323.085.212,- sampai dengan tanggal 31 Juli 2025 terealisasi Rp.165.079.790,- atau (51,09%).
- b. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran dengan jumlah Anggaran sebesar Rp.675.930.891,- dan sampai dengan 31 Juli 2025 realisasi Sebesar Rp.291.910.200,- Atau (43,19%).
- c. Sub kegiatan konsolidasi laporan keuangan SKPD,BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah daerah dengan jumlah anggaran sebesar Rp.635.935.249,-sampai dengan tanggal 31 Juli 2025 terealisasi sebesar Rp.445.299.359,- atau (70,02%).
- d. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi NTT, dianggarkan sebesar Rp.1.140.456.300,- dan realisasi sampai dengan tanggal 31 Juli sebesar Rp.445.299.359,- atau 39,04%.

Tabel 3.13

Realisasi Fisik Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Bidang Akuntansi dan Pelaporan

Kondisi per 31 Juli 2025

Program	Rincina Kegiatan	Target (dokumen/ kegiatan)	Realisasi (dokumen/ kegiatan)	Ket
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Akuntansi & Pelaporan Keuangan Daerah	1. Sub kegiatan rekonsiliasi dan verifikasi aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, pembiayaan, pendapatan, dan Beban	3 Laporan		
	2. Sub kegiatan koordinasi penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan semesteran .	3 Dokumen 1. Laporan Bulanan. 2. Laporan Triwulan. 3. Laporan semester.		
	3. Sub kegiatan konsolidasi laporan keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	4 Dokumen 1. 35 Lk SKPD 2. 4 Lk BUMD 3. 1 LKPD		
	4. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban	4 Dokumen 1. Ranperda 2. Ranpergub 3. Perda 4. Pergub		

Program	Rincina Kegiatan	Target (dokumen/ kegiatan)	Realisasi (dokumen/ kegiatan)	Ket
	Pelaksanaan APBD Provinsi NTT			

e. Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Kegiatan ini ditangani oleh Sub Bagian Keuangan, terdiri dari Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah dan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan dan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak dengan Pagu sebesar Rp. 750.299.842.087,- Realisasi

Rp 210.893.012.829,- (28,11%). Hasil (output) pelaksanaan kegiatan:

Laporan hasil Analisis Perencanaan dan pelaksanaan pembayaran cicilan pokok dan bunga pinjaman Pemerintah daerah .

⇒ Laporan Hasil Analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan.

⇒ Laporan hasil pengelolaan darurat dan mendesak .

BAB IV

PERMASALAHAN DAN SOLUSI

4.1 Permasalahan dan Solusi

Dalam proses pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang pada Badan Keuangan Daerah terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi. Adapun permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat

a. Permasalahan

1. Sebagian besar (bidang/sub bidang/sekretariat/sub bagian) belum menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan tepat waktu sehingga terjadi keterlambatan.
2. Arsip data masing-masing pegawai belum terkumpul seluruhnya. Hal ini dikarenakan pegawai yang bersangkutan belum menyerahkan arsipnya pada Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
3. Penanganan disiplin pegawai belum optimal. Beberapa kasus pegawai yang tidak disiplin sering kali terlambat dilaporkan, sehingga proses penyelesaian menjadi lebih rumit.

b. Solusi

1. Masing-masing bidang/sub bidang/sub bagian segera menyampaikan Laporan Bulanan paling lambat satu minggu setelah diminta.
2. Ditambah dana untuk bimtek dan diklat untuk seluruh pegawai
3. selalu menyampaikan informasi terkait pengumpulan kelengkapan arsip data pegawai melalui Nota Dinas maupun WA grup
4. Memberikan sanksi yang tegas dan konsisten terhadap pegawai yang indisipliner.
5. Atasan langsung rutin melakukan pengawasan terhadap kehadiran pegawai pada unit kerjanya, dan segera melaporkan kepada Kasubag Kepegawaian dan Umum apabila terdapat pegawai di unitnya yang melakukan tindakan indisipliner

2. Bidang Anggaran

a. Permasalahan

1. Permasalahan yang Dihadapi yakni pada proses Penginputan Rincian RKA SKPD yang mengalami keterlambatan Penginputan dikarenakan Kendala Maintenance pada Server SIPD di pusat, sehingga dibutuhkan waktu tambahan untuk penginputan RKA-SKPD (Peraturan Gubernur Pergeseran APBD Perubahan II Tahun Anggaran 2025).
2. Terdapat beberapa Sub Kegiatan Baru yang diusulkan oleh SKPD dalam Dokumen Rancangan awal KUA PPAS Tahun Anggaran 2026 tetapi tidak ada dalam Dokumen Rancangan akhir RKPD Tahun 2026.

b. Solusi

1. Menindaklanjuti Permasalahan diatas, Langkah-langkah yang dilakukan Tim Kerja Bidang Anggaran yaitu berkoordinasi SKPD dan Tim SIPD di pusdatin Kementrian Dalam Negeri sehingga Proses penginputan dapat dilaksana sesuai ketentuan dan Peraturan Gubernur Pergeseran APBD Perubahan II Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan oleh kepala daerah.
2. Menindaklanjuti Permasalahan diatas, Tim TAPD dan SKPD melakukan desakan untuk harmonisasi , Sinkronisasi dan Penyelarasan antar dokumen Perencanaan dan Dokumen Penganggaran sehingga Meminimalisir terjadinya Penambahan Sub Kegiatan Baru pada saat penandatanganan Nota Kesepakatan antara Gubernur dan DPRD.

3. Bidang Perbendaharaan

a. Permasalahan

1. PPPK Prov. NTT SK Pengangkatan 1 Juli 2025 sebanyak 5.480 orang.
2. Masih terdapat sisa Dana Alokasi Khusus Fisik tahun 2017 – 2024.
3. Tindak lanjut penyaluran DAK Fisik TA. 2025.

b. Solusi

1. Bidang Perbendaharaan melakukan penginputan data PPPK pada Sim Gaji Taspen untuk proses gaji Juli 2025.
2. Bidang Perbendaharaan berdasarkan surat tugas nomor 000.1.2.3/99/BKUD1.2, Tanggal 29 Juli 2025 bertugas ke OPD lingkup Pemprov NTT untuk menyelesaikan masalah sisa DAK Fisik tahun sebelumnya, Perbendaharaan menyarankan OPD bersurat ke Badan Keuangan Daerah Prov. NTT agar sisa dana dapat diakomodir di Tahun Anggaran 2026.
3. Bidang Perbendaharaan mengingatkan OPD agar segera melakukan penginputan realisasi SP2D, Capaian Output Kegiatan dan Upload Foto pada aplikasi OMSPAN .

4. Bidang Akuntansi dan Pelaporan

a. Permasalahan

Terkait pelaksanaan program dan kegiatan dibidang Akuntansi dan Pelaporan tidak ada. Berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan pada Bidang Akuntansi dan pelaporan, penyerapan anggaran per 31 Juli 2025 untuk bidang akuntansi dan pelaporan sudah sesuai kondisi riil, mengikuti schedule/waktu pelaksanaan program/kegiatan.

5. Bidang Pembinaan Keuangan Kabupaten/Kota

a. Permasalahan

1. Belum tepat waktu Kabupaten/Kota menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) setiap minggu dalam bulan Juli Tahun Anggaran 2025;
2. Belum tepat waktunya beberapa Kabupaten dan Kota dalam menyampaikan *hard copy* Perda dan Perbup APBD TA 2025. Kabupaten yang belum menyampaikan *hard copy* yakni: Kabupaten Lembata, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Ngada, Kabupaten TTS, kabupaten Alor, , Kota Kupang Kabupaten Ende dan Kabupaten Rote Ndao.

3. Hampir sebagian besar pemerintah kab/kota yang belum menerapkan transaksi dengan menggunakan kartu kredit pemerintah daerah (KKPD).

4. Hasil evaluasi Kabupaten Manggarai Barat masih terdapat beberapa permasalahan umum pada aspek konsistensi, kebijakan, LKPD dan LHP BPK antara lain:

a. Pada Aspek Konsisten

Kesesuaian anggaran yang tercantum pada ringkasan LRA dengan pagu pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Perda tentang APBD. Pada Pendapatan daerah terdapat Terdapat perbedaan pada jumlah realisasi TA 2024 antara Lampiran I Ranperda dan Lampiran I Ranperbup, namun secara total penjumlahan Kelompokan pendapatan PAD, tidak terdapat perbedaan. Perbedaan realisasi dimaksud terdapat pada :

1) Pajak Daerah : Realisasi : Rp.215.536.325.102,- Realisasi Ranperbup : Rp.215.536.128.204,-

2) Retribusi Daerah Realisasi Ranperda : Rp. 44.556.814.373,- Realisasi Ranperbup : Rp 44.549.436.873,-

3) Lain-lain PAD yang sah Realisasi Ranperda

Rp 11.161.429.963,- Realisasi Ranperbup Rp 11.169.004.361,-

b. Pada Aspek kebijakan

Kesesuaian persentase realisasi anggaran pendapatan serta jumlah antara total realisasi pendapatan pada rancangan perda dan rancangan Perkada. Capaian realisasi dibandingkan anggaran pada rancangan Perkada, antara lain:

1) Pada pendapatan daerah terdapat realisasi Jauh melebihi yang dianggarkan terdapat pada Perangkat Daerah: Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi ; Dinas Perdagangan dan Perindustrian; Badan Pendapatan Daerah;

2) Pada pendapatan daerah terdapat Jauh dibawah yang dianggarkan terdapat pada Perangkat Daerah : Rumah Sakit Umum Daerah Komodo; Dinas Cipta Karya, Tata Ruang,

Perumahan dan Kawasan Permukiman; Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan UKM; Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan; Dinas Lingkungan dan Pertanahan; Dinas Perhubungan; Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan; Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan; Badan Pendapatan Daerah; Badan Keuangan dan Aset Daerah.

- 3) Pada pendapatan daerah terdapat anggaran yang tidak terealisasi pada Perangkat Daerah: Rumah Sakit Umum Daerah Komodo; Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi ; Badan Pendapatan Daerah; Badan Keuangan dan Aset Daerah.
- 4) Pada Pendapatan daerah terealisasi tapi tidak dianggarkan terdapat pada perangkat daerah: Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi ; Badan Pendapatan Daerah; Badan Keuangan dan Aset Daerah.
- 5) Pada belanja daerah terdapat capaian realisasi yang jauh melebihi yang dianggarkan terdapat pada Perangkat Daerah: Puskesmas Labuan Bajo; Puskesmas Warsawe; Puskesmas Warsawe; Puskesmas Nangalili; Puskesmas Lengkong Cepang; Puskesmas Rego; Puskemas Waning.
- 6) Pada belanja daerah jauh dibawah yang dianggarkan terdapat pada Perangkat Daerah: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; Dinas Kesehatan; Puskesmas Danga; Puskesmas Boawae; Puskesmas Mauponggo; Puskesmas Nangaroro; Puskesmas Kaburea; Puskesmas Maunori; Puskesmas Jawakisa; Puskesmas Utetoto; BLUD RSD Aeramo; Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; BLUD SPAM; Badan Penanggulangan Bencana Daerah; Dinas Sosial; Dinas Lingkungan Hidup; Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; Dinas Perhubungan; Dinas Kepemudaan dan Olahraga; Dinas Pertanian; Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan; Badan

Keuangan Daerah; Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan; Inspektorat;

- 7) Pada belanja daerah yang tidak terealisasi terdapat pada perangkat daerah: Perangkat Daerah: Perangkat Daerah : Badan Riset dan Inovasi Daerah; Kecamatan Komodo; Kecamatan Mbeliling; Kecamatan Ndosso;
- 8) Pada belanja daerah . Terealisasi tetapi tidak dianggarkan pada Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan.

c. Struktur APBD

- 1) Terdapat capaian realisasi Retribusi Daerah yang prosentase yang masih rendah sebesar 71,91 % belum mencapai target kinerja yang ditetapkan sesuai ketentuan.
- 2) Terdapat capaian realisasi Lain-Lain PAD sah yang prosentase masih rendah sebesar 31,11% belum mencapai target kinerja yang ditetapkan sesuai ketentuan.
- 3) Target dan realisasi PAD 3 (tiga) Tahun terakhir mengalami fluktuasi .
- 4) Transaksi belanja Belum menggunakan kartu kredit pemerintah daerah (KKPD).

d. Laporan keuangan Pemerintah Daerah

- 1) Terdapat mutasi saldo sebesar Rp201.043.766,67,- yang belum dijelaskan dalam CaLK.
- 2) Sebagian besar piutang pajak mengalami peningkatan signifikan.
- 3) Saldo Piutang Pajak per 31 Desember 2024 sebesar Rp34.790.426.335,87, bertambah 12,37% dari saldo tahun sebelumnya.
- 4) Saldo aset lain-lain per 31 Desember 2024 sebesar Rp67.645.084.438,-, bertambah sebesar Rp16.188.288.556,- atau naik 30,97% dari saldo tahun sebelumnya.
- 5) Saldo persediaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp39.828.943.239,82, meningkat 251,97% dari tahun sebelumnya.
- 6) Terdapat peningkatan saldo Tuntutan Ganti Rugi sebesar Rp1.650.597.853,-.
- 7) Saldo Utang Beban per 31 Desember 2023 sebesar Rp8.544.052.148,- meningkat 49,27% dari saldo tahun sebelumnya.
- 8) Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.294.681.873,-, bertambah sebesar

Rp1.156.141.873,- atau naik 834,52% dari saldo tahun sebelumnya.

9) LHP = Masih terdapat temuan BPK pada Penyusunan laporan keuangan, Pendapatan, Belanja, dan asset.

5. Hasil kabupaten Manggarai timur masih terdapat beberapa permasalahan umum pada aspek konsistensi, kebijakan, LKPD dan LHP BPK antara lain:

a. Pada Aspek Konsiten

Telah terdapat konsistensi antara Rancangan Perda APBD Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan Perda APBD dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

b. Pada aspek kebijakan

Kesesuaian persentase realisasi anggaran pendapatan serta jumlah antara total realisasi pendapatan pada rancangan perda dan rancangan Perkada. Capaian realisasi dibandingkan anggaran pada rancangan Perkada, antara Lain:

1) Pada pendapatan daerah terdapat realisasi Jauh melebihi yang dianggarkan terdapat pada Perangkat Daerah: Badan Keuangan Daerah; Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah; Dinas Perhubungan; Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

2) Pada pendapatan daerah terdapat Jauh dibawah yang dianggarkan terdapat pada Perangkat Daerah : Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan; Dinas Lingkungan Hidup; Badan Keuangan Daerah; Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah; Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan; Dinas Perhubungan; Dinas Peternakan; Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat; Sekretariat Daerah.

3) Pada pendapatan daerah terdapat anggaran yang tidak terealisasi pada Perangkat Daerah: Badan Keuangan Daerah; Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan.

- 4) Pada belanja daerah jauh dibawah yang dianggarkan terdapat pada Perangkat Daerah: Dinas Kesehatan; Badan Keuangan Daerah; Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah; Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan; Dinas Peternakan; Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga; Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat; Dinas P2kbp3a; Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Uptd Rsud Borong; Sekretariat Dewan.
- 5) Pada belanja daerah yang tidak terealisasi terdapat pada perangkat daerah: Perangkat Daerah: Badan Keuangan Daerah; Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah; Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan; Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat; Dinas P2kbp3a; Sekretariat Dewan.

c. Struktur APBD

- 1) Terdapat capaian realisasi Pajak Daerah yang prosentase yang masih rendah sebesar 59,47% dan belum mencapai target kinerja yang ditetapkan sesuai ketentuan.
- 2) Terdapat capaian realisasi Retribusi Daerah yang prosentase belum memadai sebesar 72,96 % dan belum mencapai target kinerja yang ditetapkan sesuai ketentuan .
- 3) Terdapat capaian realisasi Lain-Lain PAD yang sah yang prosentase belum memadai sebesar 78,08 dan belum mencapai target kinerja yang ditetapkan sesuai ketentuan .
- 4) Target dan realisasi PAD 3 (tiga) Tahun terakhir mengalami fluktuasi .
- 5) Tingkat kemandirian kabupaten Manggarai Timur mengalami penurunan sebesar (0,76%) dari tahun 2023. Pada tahun 2023 Prosentase tingkat kemandirian kabupaten Manggarai Timur 5,03 % sedangkan Tahun 2024 sebesar 4,27 %.
- 6) Secara total belanja per kelompok belanja kabupaten Manggarai Timur hanya belanja tidak terduga yang masih

rendah yakni 57, 36 % hal ini tergantung kondisional sedangkan kelompok belanja yang lain telah mencapai diatas 90%, namun secara rincian obyek masih terdapat capaian kinerja yang belum mencapai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan seperti belanja asset tetap lainnya sebesar 79,19% dan belanja bagi hasil 20,37 % .

7) Transaksi belanja Belum menggunakan kartu kredit pemerintah daerah (KKPD).

d. Laporan keuangan Pemerintah Daerah

1) Saldo piutang daerah pada Tahun Anggaran 2024 meningkat sebesar Rp. 3.511.281.017,88 atau 115,34 % dari Saldo piutang Tahun Anggaran 2023.

2) Saldo Persediaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp20.207.913.195,05, bertambah sebesar Rp1.478.089.257,03 atau naik 7,89% dari saldo tahun sebelumnya.

3) Saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2024 sebesar Rp195.014.994.484,87, bertambah sebesar Rp158.868.076.009,79 atau naik 81,46% dari saldo tahun sebelumnya.

4) LHP = Masih terdapat temuan BPK pada Penyusunan laporan keuangan, Pendapatan, Belanja, dan aset.

6. Hasil evaluasi Kabupaten Sabu Raijua masih terdapat beberapa permasalahan umum pada aspek konsistensi, kebijakan, LKPD dan LHP BPK antara lain:

a. Pada aspek konsistensi

Kesesuaian penjumlahan rincian pendapatan masing-masing SKPD dan SKPKD dengan total pendapatan dalam Rancangan Perda dan Rancangan Perkada . Terdapat Realisasi Pendapatan yang tidak dianggarkan namun terealisasi pada Ranperda Pertanggungjawaban pada SKPD:

1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp.883.832,-

- 2) Dinas Pertanian dan Pangan sebesar Rp.1.490.000,-
- 3) Badan Keuangan Daerah sebesar Rp.665.539.500,-

b. Pada aspek kebijakan

Kesesuaian presentase realisasi anggaran pendapatan serta jumlah antara total realisasi pendapatan pada rancangan perda dan rancangan Perkada. Capaian realisasi dibandingkan anggaran pada rancangan Perkada, antara lain:

- 1) Pada pendapatan daerah terdapat realisasi Jauh melebihi yang dianggarkan terdapat pada Perangkat Daerah:: Dinas Pertanian Dan Pangan; Dinas Penanaman Modal Dan PTSP, Perindustrian Dan Perdagangan; Badan Keuangan Daerah.
- 2) Pada pendapatan daerah terdapat Jauh dibawah yang dianggarkan terdapat pada Perangkat Daerah : Dinas PUPR; Dinas Pertanian Dan Pangan; Badan Keuangan Daerah.
- 3) Pada pendapatan daerah terdapat anggaran yang tidak terealisasi pada Perangkat Daerah: Dinas Perhubungan.
- 4) Pada Pendapatan daerah terealisasi tapi tidak dianggarkan terdapat pada perangkat daerah: Dinas PUPR; Dinas Pertanian Dan Pangan; Badan Keuangan Daerah.
- 5) Pada belanja daerah jauh dibawah yang dianggarkan terdapat pada Perangkat Daerah: Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga; RSUD; Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB; Puskesmas Seba; Dinas PUPR; Dinas Lingkungan Hidup; Dinas Perhubungan; Dinas Komunikasi Dan Informatika; Dinas Penanaman Modal Dan PTSP, Perindustrian Dan Perdagangan; Dinas Kelautan Dan Perikanan; Bagian Kesejahteraan Rakyat; Sekretariat DPRD; Badan Keuangan Daerah; Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan Dan Pelatihan; Inspektorat Daerah.
- 6) Pada belanja daerah yang tidak terealisasi terdapat pada perangkat daerah: Perangkat Daerah: Perangkat Daerah :

Puskesmas Seba; Dinas PUPR; Dinas Kelautan Dan Perikanan; Inspektorat Daerah.

c. Struktur APBD

- 1) Terdapat capaian realisasi Pajak Daerah yang prosentase yang masih rendah sebesar 72,96% dan belum mencapai target kinerja yang ditetapkan sesuai ketentuan.
- 2) Terdapat capaian realisasi Retribusi Daerah yang prosentase belum memadai sebesar 68,95 % dan belum mencapai target kinerja yang ditetapkan sesuai ketentuan .
- 3) Terdapat capaian realisasi Sumbangan kepada pihak ke tiga yang prosentase belum memadai sebesar 66,50 dan belum mencapai target kinerja yang ditetapkan sesuai ketentuan.
- 4) Terdapat capaian realisasi Pendapatan Dana Kapitasi JKN yang prosentase belum memadai sebesar 79,90 dan belum mencapai target kinerja yang ditetapkan sesuai ketentuan.
- 5) Target dan realisasi PAD 3 (tiga) Tahun terakhir secara prosentase mengalami fluktuasi, namun angka riil realisasi mengalami penurunan dari TA 2023.
- 6) Capaian realisasi belanja daerah secara total sebesar 90,07% namun pada rincian belanja asset tetap lainnya capaian realisasinya secara prosentase masih dibawah yakni, 44,85 dan kelompok belanja tidak terduga capaian realisasi sebesar 1,91% capaian realisasi BTT sangat tergantung kondisi/keadaan yang terjadi (situasional).
- 7) Target realisasi belanja pegawai, belanja modal dan belanja tidak terduga tiga tahun terakhir secara prosentase mengalami fluktuatif.
- 8) Rasio Tingkat kemandirian kabupaten Sabu Raijua mengalami penurunan sebesar (1,03%) dibandingkan tahun 2023 sebesar 4,79% dan di tahun 2024 sebesar 3,76%.
- 9) Masih terdapat Sisa dana kapitasi yang belum dimanfaatkan sebesar Rp. 2.277.579.665,04 atau 36,95 %.

- 10) Masih terdapat Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah yang belum direalisasikan sebesar Rp. 200.000.000,00
- 11) Belanja infraktur pelayanan publik belum mencapai 40% dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan atau transfer kepada daerah dan atau desa
- 12) Transaksi belanja Belum menggunakan kartu kredit pemerintah daerah (KKPD).

d. Laporan keuangan Pemerintah Daerah

LHP= Masih terdapat temuan BPK pada Penyusunan laporan keuangan, Pendapatan, Belanja, dan aset.

7. Hasil evaluasi Kabupaten Sumba Barat Daya masih terdapat beberapa permasalahan umum pada aspek konsistensi, kebijakan, LKPD dan LHP BPK antara lain:

a. Pada aspek konsistensi

Kesesuaian penjumlahan rincian pendapatan masing-masing SKPD dan SKPKD dengan total pendapatan dalam Rancangan Perda dan Rancangan Perkada . Terdapat Realisasi PAD yang tidak dianggarkan namun terealisasi pada Ranperda Pertanggungjawaban APBD pada OPD:

- 1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp.306.325.375,-
- 2) Puskesmas Werilolo sebesar Rp.234.012,-
- 3) Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp.435.993.600,-

b. Pada Aspek Kebijakan

Kesesuaian persentase realisasi anggaran pendapatan dan belanja serta jumlah antara total realisasi pendapatan pada rancangan perda dan rancangan Perkada. Capaian realisasi dibandingkan anggaran pada rancangan Perkada, antara lain:

- 1) Pada pendapatan daerah terdapat realisasi Jauh melebihi yang dianggarkan terdapat pada Perangkat Daerah: Dinas Kesehatan; Dinas PUPR; Badan Keuangan Dan Aset Daerah.
- 2) Pada pendapatan daerah terdapat Jauh dibawah yang dianggarkan terdapat pada Perangkat Daerah : Puskesmas

- Radamata; Puskesmas Kawango Hari; Puskesmas Delu Depa; Puskesmas Weekombak; Puskesmas Tena Teke; RSUD Pratama Reda Bolo; Dinas Perhubungan; Dinas Penanaman Modal Dan PTSP; Dinas Perikanan; Dinas Pariwisata; Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan; Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan; Badan Keuangan dan Aset Daerah Pada pendapatan daerah terdapat anggaran yang tidak terealisasi pada Perangkat Daerah: Rumah Sakit Umum Daerah Komodo; Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi ; Badan Pendapatan Daerah; Badan Keuangan dan Aset Daerah.
- 3) Pada Pendapatan daerah terealisasi tapi tidak dianggarkan terdapat pada perangkat daerah: Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan; Puskesmas Werilolo; Badan Keuangan Dan Aset Daerah.
 - 4) Pada belanja daerah terdapat capaian realisasi yang jauh melebihi yang dianggarkan terdapat pada Perangkat Daerah: Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan; Dinas Kesehatan; Puskesmas Delu Depa; Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman; BPBD; Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil; Dinas Kepemudaan dan Olah Raga; Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan; Sekretariat Daerah; Bapperida; BKAD; Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
 - 5) Pada belanja daerah jauh dibawah yang dianggarkan terdapat pada Perangkat Daerah: Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan; Dinas Kesehatan; Puskesmas Delu Depa; Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman; BPBD; Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil; Dinas Kepemudaan dan Olah Raga; Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan; Sekretariat Daerah; Bapperida; BKAD; Badan Kepegawaian

dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

- 6) Pada belanja daerah yang tidak terealisasi terdapat pada perangkat daerah: Perangkat Daerah: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil; Dinas Pariwisata; Bapperida; BKAD.

c. Struktur APBD

- 1) Capaian realisasi pendapatan daerah secara total sebesar Rp. 99,07% namun pada prosentase capaian realisasi rincian pendapatan pajak dan retribusi masih dibawah ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya. pajak parkir 5,94% dan Pajak Bumi Bangunan Perkotaan dan Pedesaan 43,43% sedangkan retribusi daerah khususnya Pelayanan Pasar sebesar 52,36 %, Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebesar 32,20%, Pelayanan Tempat Khusus Parkir sebesar 64,95% Penjualan Produksi Usaha Daerah sebesar 32,74 % dan Persetujuan Bangunan Gedung sebesar 54,15 %.
- 2) Target dan realisasi PAD 3 (tiga) secara prosentase tahun terakhir mengalami fluktuasi .
- 3) kelebihan realisasi SiLPA Tahun 2023 sebesar Rp.142.612.871,-
- 4) Belanja infraktur pelayanan publik belum mencapai 40% dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan atau transfer kepada daerah dan atau desa.
- 5) Transaksi belanja Belum menggunakan kartu kredit pemerintah daerah (KKPD).

d. Laporan keuangan Pemerintah Daerah

- 1) Saldo Piutang Pendapatan per 31 Desember 2024 sebesar Rp18.663.689.750,09,-, bertambah sebesar Rp2.293.905.922,09,- atau naik 14,01% dibandingkan saldo tahun sebelumnya.

- 2) Saldo Investasi Permanen per 31 Desember 2024 sebesar Rp97.474.248.829,-, bertambah Rp12.000.000.000,- atau naik 14,04% dari saldo tahun sebelumnya.
 - 3) Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp39.166.371.209,59, bertambah Rp2.246.056.188,70 atau naik 6,06% dari saldo tahun sebelumnya Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp39.166.371.209,59, bertambah Rp2.246.056.188,70 atau naik 6,06% dari saldo tahun sebelumnya.
 - 4) Saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2024 sebesar Rp35.802.361.059,50, bertambah sebesar Rp2.793.018.688,03 atau naik 8,46% dari saldo tahun sebelumnya.
 - 5) LHP = Masih terdapat temuan BPK pada Penyusunan laporan keuangan, Pendapatan, Belanja, dan asset.
8. Hasil evaluasi Kota Kupang masih terdapat beberapa permasalahan umum pada aspek konsistensi, kebijakan, LKPD dan LHP BPK antara lain:
- a. Pada Aspek konsistensi

Telah terdapat konsistensi antara Rancangan Perda APBD Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan Perda APBD dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024
 - b. Pada aspek kebijakan

Kesesuaian persentase realisasi anggaran pendapatan dan belanja serta jumlah antara total realisasi pendapatan pada rancangan perda dan rancangan Perkada. Capaian realisasi dibandingkan anggaran pada rancangan Perkada, antara lain:

 - 1) Pada pendapatan daerah terdapat Jauh dibawah yang dianggarkan terdapat pada Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perhubungan, Dinas lingkungan Hidup dan kebersihan, Dinas Pertanian, Badan Keuangan dan Aset Daerah, dan Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang.

- 2) Pada pendapatan daerah terealisasi tapi tidak di anggarkan pada Perangkat Daerah: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas Pertanian.
- 3) Pada belanja daerah terdapat capaian realisasi yang jauh melebihi yang dianggarkan terdapat pada Perangkat Daerah: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- 4) Pada belanja daerah jauh dibawah yang dianggarkan terdapat pada Perangkat Daerah: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, RSUD S.K Lerik, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Ketahanan Pangan Kota Kupang, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Kecamatan Kota Lama, Kecamatan Maulafa.
- 5) Pada belanja daerah yang tidak terealisasi terdapat pada perangkat daerah: Perangkat Daerah: Perangkat Daerah : Sekretariat DPRD dan Kecamatan Kota Raja.

c. Struktur APBD

- 1) Terdapat capaian realisasi Retribusi Daerah yang prosentase belum memadai sebesar 59,87 % dan belum mencapai target kinerja yang ditetapkan sesuai ketentuan .
- 2) Terdapat capaian realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang prosentase belum memadai sebesar 41,33 % dan belum mencapai target kinerja yang ditetapkan sesuai ketentuan .
- 3) Terdapat capaian realisasi Lain-lain PAD yang sah yang prosentase belum memadai sebesar 40,70 % dan belum mencapai target kinerja yang ditetapkan sesuai ketentuan .
- 4) Target dan realisasi PAD secara prosentase 3 (tiga) Tahun terakhir mengalami fluktuasi .
- 5) Tingkat kemandirian Kota Kupang mengalami penurunan sebesar (1,84%) dari tahun 2023. Pada tahun 2023 Prosentase

tingkat kemandirian Kota Kupang 21,64% sedangkan Tahun 2024 sebesar 19,81%.

- 6) Capaian realisasi belanja modal tanah belum mencapai realisasi yang memadai yakni, 58,94%.
- 7) Capaian realisasi belanja tidak terduga belum mencapai realisasi yang memadai yakni, 35,38% sangat tergantung kondisi/keadaan yang terjadi (situasional).
- 8) Target dan realisasi belanja pegawai, belanja modal dan belanja tidak terduga 3 (tiga) tahun terakhir cenderung menurun.
- 9) Belanja infraktur pelayanan publik belum mencapai 40% dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan atau transfer kepada daerah dan atau desa.
- 10) Transaksi belanja Belum menggunakan kartu kredit pemerintah daerah (KKPD).

d. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

- 1) Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 merupakan sisa Uang Persediaan dan sisa belanja LS yang belum disetorkan ke Kas Daerah sampai 31 Desember 2024.
- 2) Dalam saldo sisa Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp83.573.689,- terdapat komponen yang bersumber dari kelebihan bayar pajak restoran dari PT Sari Melati Kencana sebesar Rp970.744,00, kelebihan setor pajak reklame JCO Donut and Caffé sebesar Rp1.207.227,00 yang merupakan hak wajib pajak yang belum dikembalikan ke wajib pajak dan pajak parkir sebesar Rp7.140,-. Saldo tersebut merupakan nilai yang terbawa dari LKPD Tahun 2021 dan tahun 2024 dan belum diselesaikan pembayarannya pada TA 2024 serta masih berada dalam penguasaan bendahara penerimaan Badan Pendapatan Daerah.
- 3) Saldo kas di bendahara penerimaan Bapenda per 31 Desember senilai Rp73.884.489,- yang pada Tahun Anggaran 2025

- disetorkan ke RKUD sebesar Rp63.545.716,00 sehingga menyisakan saldo senilai Rp10.429.773,00 masih berada di rekening bendahara penerimaan.
- 4) Sebagian besar piutang pajak mengalami peningkatan signifikan.
 - 5) Saldo Persediaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp18.022.940.796,23, bertambah sebesar Rp4.163.122.679,72 atau naik 30,04 dari saldo tahun sebelumnya.
 - 6) Dalam Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2024 sebesar Rp14.149.439.395,14, bertambah sebesar Rp2.100.104.034,44 atau naik 17,43% dari saldo tahun sebelumnya.
 - 7) LHP = Masih terdapat temuan BPK pada Pendapatan, Belanja, dan aset.
9. Hasil evaluasi Kabupaten Sumba Tengah masih terdapat beberapa permasalahan umum pada aspek konsistensi, kebijakan, LKPD dan LHP BPK antara lain:
- a. Pada Aspek Konsistensi
 - 1) Kesesuaian penjumlahan rincian pendapatan masing-masing SKPD dan SKPKD dengan total pendapatan dalam Rancangan Perda dan Rancangan Perkada. Terdapat Realisasi Pendapatan yang tidak dianggarkan namun terealisasi pada Ranperda Pertanggungjawaban pada SKPD:
 - a) Puskesmas Malinjak sebesar Rp.2.100.000,-
 - b) Puskesmas Wairasa sebesar Rp.10.525.000,-
 - c) Puskesmas Lawonda sebesar Rp.8.100.000,-
 - d) Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp.7.239.000,-
 - e) Badan Keuangan Daerah sebesar Rp.665.539.500,-.
 - 2) Terdapat Realisasi Belanja yang tidak dianggarkan namun terealisasi pada Ranperda Pertanggungjawaban pada SKPD:

- a) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp.204.977.000,-
 - b) Puskesmas Malinjak sebesar Rp.29.563.500,-
 - c) Puskesmas Pahar sebesar Rp.30.131.000,-
 - d) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp.160.239.780,-
 - e) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebesar Rp.29.250.000,-.
- 3) Kesesuaian penjumlahan rincian pembiayaan pada Rancangan Perda dengan total pembiayaan dalam Rancangan Perda dan Rancangan Perkada terdapat sisa belanja lainnya yang tidak dianggarkan namun terealisasi sebesar rp.1.723.060.749,31,-
- b. Pada Aspek kebijakan
- Kesesuaian persentase realisasi anggaran pendapatan serta jumlah antara total realisasi pendapatan pada rancangan perda dan rancangan Perkada. Capaian realisasi dibandingkan anggaran pada rancangan Perkada, antara lain:
- 1) Pada pendapatan daerah terdapat realisasi Jauh melebihi yang dianggarkan terdapat pada Perangkat Daerah: Badan Keuangan Daerah.
 - 2) Pada pendapatan daerah terdapat Jauh dibawah yang dianggarkan terdapat pada Perangkat Daerah : Rumah Sakit Umum Daerah, Puskesmas Mananga, Puskesmas Wairasa, Puskesmas Lawonda, Puskesmas Lendiwacu, Puskesmas Pahar, Puskesmas Umbu Riri, UPTD Pengelola Air Minum, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, UPTD Pembibitan dan Agribisnis Ternak, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Bagian Umum, Badan Keuangan Daerah.

- 3) Pada pendapatan daerah terdapat anggaran yang tidak terealisasi pada Perangkat Daerah: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Badan Keuangan Daerah.
 - 4) Pada Pendapatan daerah terealisasi tapi tidak dianggarkan terdapat pada perangkat daerah: Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi ; Puskesmas Malinjak, Puskesmas Wairasa, Puskesmas Lawonda, Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan, Badan Keuangan Daerah.
 - 5) Pada belanja daerah jauh dibawah yang dianggarkan terdapat pada Perangkat Daerah: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; Dinas Kesehatan; Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, Dinas Kesehatan, RSUD, Puskesmas Malinjak, Puskesmas Pahar, Dinas PUPR, UPTD Pengelola Air Minum, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran, Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Dinas Perhubungan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Bagian Administrasi Pembangunan, Bagian Hukum, Kecamatan Umbu Ratu Nggay;
 - 6) Pada belanja daerah yang tidak terealisasi terdapat pada perangkat daerah: Perangkat Daerah: Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan, Puskesmas Malinjak, Puskesmas Pahar, Dinas PUPR, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran, Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Dinas Perhubungan, Bagian Administrasi Pembangunan, Bagian Hukum, Kecamatan Umbu Ratu Nggay.
 - 7) Pada belanja daerah . Terealisasi tetapi tidak dianggarkan pada Perangkat Daerah : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, Puskesmas Malinjak, Puskesmas Pahar, Dinas PUPR, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- c. Struktur APBD
- 1) Terdapat capaian realisasi Retribusi Daerah yang prosentase belum memadai sebesar 71,64 % dan belum mencapai target kinerja yang ditetapkan sesuai ketentuan.

- 2) Capaian realisasi pendapatan asli daerah secara total prosentase sebesar Rp. 85,82% namun pada prosentase capaian realisasi rincian pendapatan pajak dan retribusi serta Lain-lain PAD yang sah masih dibawah ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya. pajak hotel sebesar 37,44%, pajak reklame sebesar 4, 80% dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebesar 53,67% sedangkan retribusi daerah khususnya Pelayanan Kesehatan sebesar 69,63%, Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 65,59 % Pelayanan Pasar - %, Penjualan Produksi Usaha Daerah sebesar 69,83 % dan lain-lain PAD yang sah yakni Hasil Pengelolaan Dana Bergulir sebesar 15,73%, Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain 0%, Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir 0% .
 - 3) Target dan realisasi PAD secara prosentase 3 (tiga) Tahun terakhir mengalami fluktuasi .
 - 4) Target dan realisasi belanja pegawai, belanja modal dan belanja tidak terduga 3 (tiga) tahun terakhir mengalami fluktuasi.
 - 5) Terdapat sisa anggaran dana kapitasi sebesar
Rp. 778.302.345,-
 - 6) Belanja infraktur pelayanan publik belum mencapai 40% dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan atau transfer kepada daerah dan atau desa.
 - 7) Transaksi belanja Belum menggunakan kartu kredit pemerintah daerah (KKPD).
- d. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- 1) Saldo piutang daerah Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah per 31 Desember 2024 sebesar Rp10.987.200.390,64, bertambah sebesar Rp1.456.879.762,55 atau 15,29% dari saldo tahun 2023.
 - 2) Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp352.391.344,-, tidak terdapat perubahan saldo pada

KDP di Satuan Kerja Hal ini menunjukkan tidak adanya progres pengerjaan atas masing-masing obyek KDP.

3) LHP = Masih terdapat temuan BPK pada Penyusunan laporan keuangan, Belanja, dan aset.

10. Hasil evaluasi Kabupaten Manggarai masih terdapat beberapa permasalahan umum pada aspek konsistensi, kebijakan, LKPD dan LHP BPK antara lain:

a. Kebijakan

1) Perbandingan realisasi dengan anggaran masing-masing akun, jenis, obyek, dan rincian obyek pendapatan pada masing-masing SKPD dan SKPKD pada rancangan perkada. Pada Pendapatan daerah terdapat Terdapat perbedaan pada jumlah realisasi TA 2024 antara Lampiran I Ranperda dan Lampiran I Ranperbup, namun secara total penjumlahan Kelompokan pendapatan PAD, tidak terdapat perbedaan. Terdapat jenis, obyek, dan rincian obyek belanja pada SKPD dalam rancangan Perkada yang terealisasi: Jauh melebihi yang dianggarkan, Jauh di bawah yang dianggarkan, Tidak terealisasi, dan Terealisasi tetapi tidak dianggarkan:

a) Pada pendapatan daerah terdapat realisasi Jauh melebihi yang dianggarkan terdapat pada Perangkat Daerah: Dinas Kesehatan.

b) Pada pendapatan daerah terdapat Jauh dibawah yang dianggarkan terdapat pada Perangkat Daerah : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga; Dinas Kesehatan; Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang; Badan Penanggulangan Bencana Daerah; Dinas Sosial; Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah; Badan Keuangan dan Aset Daerah.

c) Pada pendapatan daerah terdapat anggaran yang tidak terealisasi pada Perangkat Daerah: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga; Dinas Kesehatan; Badan

Penanggulangan Bencana Daerah; Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; Badan Keuangan dan Aset Daerah; Kecamatan Satar Mese; Kecamatan Reok; Kecamatan Wae Rii; Kecamatan Reok Barat; Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik Daerah. Pada Pendapatan daerah terealisasi tapi tidak dianggarkan terdapat pada perangkat daerah: Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi ; Badan Pendapatan Daerah; Badan Keuangan dan Aset Daerah.

b. Struktur APBD

- 1) Terdapat capaian realisasi Pajak Daerah yang prosentase belum memadai sebesar 60,34% dan belum mencapai target kinerja yang ditetapkan sesuai ketentuan.
- 2) Terdapat capaian realisasi Retribusi Daerah yang prosentase belum memadai sebesar 51,00% dan belum mencapai target kinerja yang ditetapkan sesuai ketentuan.
- 3) Realisi Dividen atas Penyertaan Modal pada BUMD yang tidak dianggarkan namun terealisasi. Apabila diprediksikan merupakan sumber penerimaan tetap berulang, agar dianggarkan sebagai obyek sumber hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Tahun-tahun berikutnya.
- 4) Target dan realisasi PAD 3 (tiga) Tahun terakhir secara prosentase mengalami fluktuasi namun khusus pajak dan retribusi 3 (tiga) tahun terakhir cenderung menurun.
- 5) Belanja infraktur pelayanan publik belum mencapai 40% dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan atau transfer kepada daerah dan atau desa.
- 6) Total realisasi belanja stunting hanya mencapai 54,90% dari yang dianggarkan sebesar Rp. 16.196.376.000,00.
- 7) Transaksi belanja Belum menggunakan kartu kredit pemerintah daerah (KKPD).

c. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

- 1) Saldo Kas Dana Kapitasi FKTP per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.408.785.857,26,-, bertambah Rp3.334.108,26,- atau 0,14% dari saldo tahun sebelumnya.
 - 2) Saldo Piutang Pajak per 31 Desember 2024 sebesar Rp18.320.010.209,64, bertambah sebesar Rp1.021.130.408,- atau naik 5,90% dari saldo tahun sebelumnya.
 - 3) Saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2024 sebesar Rp3.157.516.873,-, bertambah sebesar Rp450.282.920,- atau naik 16,63% dari saldo tahun sebelumnya.
 - 4) Saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2024 sebesar Rp8.151.304.478,13,-, bertambah Rp3.405.334.824,13,- atau naik 71,75% dari saldo tahun sebelumnya.
 - 5) Saldo Persediaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp15.324.552.840,63, bertambah sebesar Rp2.873.671.836,83 atau naik 23,08% dari saldo tahun sebelumnya.
 - 6) Saldo Investasi Permanen per 31 Desember 2024 sebesar Rp156.450.628.582,45, bertambah sebesar Rp1.509.720.907,94 atau 0,97% dari saldo tahun sebelumnya.
 - 7) Saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2024 sebesar Rp48.817.095.229,96, bertambah sebesar Rp9.461.818.325,52 atau naik 24,04% dari saldo tahun sebelumnya.
 - 8) LHP = Masih terdapat temuan BPK pada Penyusunan laporan keuangan, Pendapatan, Belanja, dan aset.
11. Hasil evaluasi Kabupaten Lembata masih terdapat beberapa permasalahan umum pada aspek konsistensi, kebijakan, LKPD dan LHP BPK antara lain:
- a. Pada aspek konsistensi
 - 1) Kesesuaian penjumlahan rincian pendapatan masing-masing SKPD dan SKPKD dengan total pendapatan dalam Rancangan Perda dan Rancangan Perkada Terdapat Realisasi Pendapatan yang tidak dianggarkan namun terealisasi pada Ranperda Pertanggungjawaban pada SKPD.

- a) Dinas Pendidikan sebesar Rp18.702.171,00.
- b) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp.33.265.185,00.
- c) Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertanahan sebesar Rp832.500,00.
- d) Dinas Perhubungan dengan sub rincian obyek: Retribusi Terminal sebesar Rp940.000,00
- e) Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Kebudayaan sebesar Rp89,200,00
- f) Dinas Perikanan sebesar Rp1.266.000,00
- g) Sekretariat Daerah sebesar Rp5.905.000,00
- h) Badan Keuangan Daerah dengan sub rincian:
 - 1) Hasil Penjualan Aset Lain-Lain sebesar Rp797.500,00
 - 2) Jasa Giro sebesar Rp. 43.933.616
 - 3) Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain sebesar Rp8.173.596,-
 - 4) Pendapatan dari Pengembalian sebesar Rp 257.567.777,00
 - 5) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp6.463.383.208,-
- i) Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp32.323.048,00.
- j) Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar Rp3.500.000,-
- 2) Terdapat realisasi rincian obyek Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya yang tidak dianggarkan namun terealisasi pada Ranperbup Pertanggungjawaban pada SKPD
 - a) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, dengan sub kegiatan antara lain:
 - 1) Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah sebesar Rp131.499.000,00.
 - 2) Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah sebesar Rp541.176.940,00.

- 3) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU sebesar Rp79.944.000,00.
 - 4) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah sebesar Rp71.013.278,00.
 - 5) Pengadaan Mebel Sekolah sebesar Rp288.165.000,00.
 - 6) Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa sebesar Rp499.805.000,00
 - 7) Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar sebesar Rp404.313.000,00
 - 8) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah sebesar Rp255.895.200,00
 - 9) Pembangunan Laboratorium sebesar Rp176.126.000,00
 - 10) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah sebesar Rp394.721.574,00
 - 11) Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium sebesar Rp152.386.640,00
 - 12) Pengadaan Mebel Sekolah sebesar Rp503.904.000,00
 - 13) Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa sebesar Rp53.000.000,00
 - 14) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU sebesar Rp157.879.940,00
 - 15) Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD sebesar Rp393.432.400,00.
- b) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dengan sub kegiatan antara lain:
- 1) Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan, dengan rincian obyek belanja:
 - 2) Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat sebesar Rp5.590.946.561,00; dan

- 3) Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya sebesar Rp493.202.700,00.
- 4) Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat di Kawasan Strategis Kab./Kota sebesar Rp149.850.000,00.
- 5) Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp60.069.722,00.
- 6) Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG sebesar Rp54.690.600,00.
- c) Dinas Kesehatan , Sub Kegiatan Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya sebesar Rp123.615.725,00.
- d) Satuan Polisi Pamong Praja, Sub Kegiatan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah sebesar Rp6.107.800,00.
- e) Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Sub Kegiatan Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB sebesar Rp35.135.000,00.
- f) Dinas Lingkungan Hidup, Sub Kegiatan Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kab./kota atau TPA/TPST Regional sebesar Rp34.148.900,00.
- 3) Kesesuaian penjumlahan rincian pembiayaan pada Rancangan Perda dengan total pembiayaan dalam Rancangan Perda dan Rancangan Perkada.Terdapat Penerimaan Pembiayaan Daerah

yang tidak dianggarkan namun terealisasi sebesar
Rp9.415.818,15.

b. Pada Aspek kebijakan

Perbandingan realisasi dengan anggaran masing-masing akun, jenis, obyek, dan rincian obyek pendapatan pada masing-masing SKPD dan SKPKD pada rancangan perkada. Terdapat jenis, obyek, dan rincian obyek belanja pada SKPD dalam rancangan Perkada yang terealisasi: Jauh melebihi yang dianggarkan; Jauh di bawah yang dianggarkan; Tidak terealisasi, dan Terealisasi tetapi tidak dianggarkan Kesesuaian persentase realisasi anggaran pendapatan serta jumlah antara total realisasi pendapatan pada rancangan perda dan rancangan Perkada. Capaian realisasi dibandingkan anggaran pada rancangan Perkada, antara lain:

- 1) pada pendapatan daerah terdapat realisasi Jauh melebihi yang dianggarkan terdapat pada Perangkat Daerah: Dinas Pendidikan; RSUD; Dinas PUPR; Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertanahan; Dinas Perhubungan; Dinas Penanaman Modal dan PTSP; Dinas Kerasipan dan Perpustakaan; Dinas Perikanan; Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan; Sekretariat Daerah; Badan Keuangan dan Aset Daerah; Badan Pendapatan Daerah.
- 2) pada pendapatan daerah terdapat Jauh dibawah yang dianggarkan terdapat pada Perangkat Daerah : Dinas PUPR; Dinas Komunikasi dan Informatika; Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan; Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Kebudayaan; Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; Dinas Perikanan; Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan; Sekretariat Daerah; Badan Keuangan dan Aset Daerah; Badan Pendapatan Daerah
- 3) Pada pendapatan daerah terdapat anggaran yang tidak terealisasi pada Perangkat Daerah: Dinas PUPR, Dinas

Perikanan; Sekretariat Daerah; Badan Keuangan dan Aset Daerah; Badan Pendapatan Daerah; Badan Pendapatan Daerah; Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

- 4) Pada Pendapatan daerah terealisasi tapi tidak dianggarkan terdapat pada perangkat daerah: Dinas Pendidikan; Dinas Pendidikan; Dinas Kesehatan; Dinas PUPR; Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertanahan; Dinas Perhubungan; Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Kebudayaan; Dinas Perikanan; Sekretariat Daerah; Badan Keuangan dan Aset Daerah
- 5) Pada belanja daerah jauh dibawah yang dianggarkan terdapat pada Perangkat Daerah: Dinas Pendidikan; Dinas Kesehatan; Dinas PUPR; Satuan Polisi Pamong Praja; Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan; Badan Keuangan dan Aset Daerah; Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; Kecamatan Nubanukan; Kecamatan Buyasuri.
- 6) Pada belanja daerah yang tidak terealisasi terdapat pada perangkat daerah: Perangkat Daerah: Perangkat Daerah : Dinas Pendidikan; Dinas PUPR; Satuan Polisi Pamong Praja; Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; Dinas Lingkungan Hidup; Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Sekretariat DPRD; Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Pada belanja daerah . Terealisasi tetapi tidak dianggarkan pada Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan.
- 7) Pada belanja daerah yang tidak terealisasi tidak dianggarkan terdapat pada perangkat daerah: Dinas Pendidikan; Dinas PUPR; Satuan Polisi Pamong Praja; Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; Dinas Lingkungan Hidup.

c. Struktur APBD

- 1) Terdapat capaian realisasi Pajak Daerah yang prosentase belum memadai sebesar 58,21% dan belum mencapai target kinerja yang ditetapkan sesuai ketentuan.
- 2) Target dan realisasi PAD 3 (tiga) Tahun terakhir secara prosentase mengalami cenderung menurun .
- 3) Rasio kemandirian kabupaten Lembata menurun (3,08%) dari Tahun 2023 sebesar 7,76% dan Tahun 2024 4,68%.
- 4) Terdapat kelebihan realisasi SiLPA Tahun 2023 sebesar Rp.5.220.817,95.
- 5) Transaksi belanja Belum menggunakan kartu kredit pemerintah daerah (KKPD).

d. Laporan keuangan Pemerintah Daerah

- 1) Saldo Piutang Pajak per 31 Desember 2024 sebesar Rp4.534.684.709,19, bertambah sebesar Rp966.108.880,- atau 27,07% dari saldo tahun sebelumnya.
- 2) Saldo Persediaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp25.716.457.677,45, bertambah sebesar Rp11.309.425.075,01,- atau 78,50% dari saldo tahun sebelumnya.
- 3) Saldo Utang Pfk per 31 Desember 2024 sebesar Rp135.082.982,-, bertambah sebesar Rp7.871.982,- atau 6,19% dari saldo tahun sebelumnya.
- 4) LHP = Masih terdapat temuan BPK pada Penyusunan laporan keuangan, Pendapatan, Belanja, dan aset.

12. Hasil evaluasi Kabupaten Belu masih terdapat beberapa permasalahan umum pada aspek konsistensi, kebijakan, LKPD dan LHP BPK antara lain:

a. Pada aspek kebijakan

- 1) Perbandingan realisasi dengan anggaran masing-masing akun, jenis, obyek, dan rincian obyek pendapatan pada masing-masing SKPD dan SKPKD pada rancangan perkadapada Terdapat jenis, obyek, dan rincian obyek belanja pada SKPD

dalam rancangan Perkada yang terealisasi: Jauh melebihi yang dianggarkan, Jauh di bawah yang dianggarkan, Tidak terealisasi, dan Terealisasi tetapi tidak dianggarkan.

- a) pada pendapatan daerah terdapat Jauh dibawah yang dianggarkan terdapat pada Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perhubungan, Dinas lingkungan Hidup dan kebersihan, Dinas Pertanian, Badan Keuangan dan Aset Daerah, dan Badan Pendapatan Daerah.
 - b) Pada Pendapatan daerah terealisasi tapi tidak dianggarkan terdapat pada perangkat daerah: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas Pertanian.
 - c) Pada belanja daerah jauh dibawah yang dianggarkan terdapat pada Perangkat Daerah: Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Pariwisata, Badan Keuangan Dan Aset Daerah, Badan Kepegawaian, Kecamatan Atambua Kota, Atambua Selatan, dan Atambua Barat;
- 2) Pada belanja daerah yang tidak terealisasi terdapat pada perangkat daerah: Perangkat Daerah: Perangkat Daerah : Badan Riset dan Inovasi Daerah; Kecamatan Komodo; Kecamatan Mbeliling; Kecamatan Ndosso;
 - 3) Pada belanja daerah . yang tidak terealisasi pada Perangkat Daerah : Badan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
 - 4) Pada pembiayaan daerah tidak terrealisasi terdapat pada badan keuangan dan aset daerah.
- b. Struktur APBD
- 1) Terdapat capaian realisasi Pajak Daerah yang prosentase belum memadai sebesar **63,16%** dan belum mencapai target kinerja yang ditetapkan sesuai ketentuan.

- 2) Terdapat capaian realisasi Retribusi Daerah yang prosentase belum memadai sebesar **44,60%** dan belum mencapai target kinerja yang ditetapkan sesuai ketentuan.
- 3) Terdapat capaian realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang sah prosentase belum memadai sebesar **46,65%** dan belum mencapai target kinerja yang ditetapkan sesuai ketentuan.
- 4) Target dan realisasi PAD 3 (tiga) Tahun terakhir secara prosentase mengalami fluktuasi .
- 5) Belanja infraktur pelayanan publik belum mencapai 40% dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan atau transfer kepada daerah dan atau desa.

c. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

- 1) Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 sebesar Rp422.600,-, bertambah 100% dari saldo sebelumnya.
- 2) Saldo Piutang Daerah per 31 Desember 2024 sebesar Rp39.282.331.503,33 bertambah sebesar Rp925.516.435,18 atau naik 2,41% dari saldo tahun sebelumnya.
- 3) Saldo Persediaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp58.039.243.043,21, bertambah sebesar Rp36.616.877.896,37 atau naik 170,93% dari saldo tahun sebelumnya.
- 4) Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2024 sebesar Rp29.377.040.131,24, bertambah sebesar Rp10.758.804.534,20 atau naik 57,79% dari saldo tahun sebelumnya.
- 5) LHP = Masih terdapat temuan BPK pada Penyusunan laporan keuangan, Pendapatan, Belanja, dan aset.

13. Hasil evaluasi Kabupaten Flores Timur masih terdapat beberapa permasalahan umum pada aspek konsistensi, kebijakan, LKPD dan LHP BPK antara lain:

a. Pada aspek kebijakan

Perbandingan realisasi dengan anggaran masing-masing akun, jenis, obyek, dan rincian obyek pendapatan pada masing-masing

SKPD dan SKPKD pada rancangan perkada. Terdapat jenis, obyek, dan rincian obyek belanja pada SKPD dalam rancangan Perkada yang terealisasi: Jauh melebihi yang dianggarkan, Jauh di bawah yang dianggarkan, Tidak terealisasi, dan Terealisasi tetapi tidak dianggarkan.

- 1) Pada pendapatan daerah terdapat realisasi Jauh melebihi yang dianggarkan terdapat pada Perangkat Daerah: Dinas Perhubungan; Dinas Komunikasi Dan Informatika; Dinas Perkebunan Dan Peternakan; Dinas Perdagangan Dan Perindustrian; Badan Keuangan Dan Aset Daerah; Badan Pendapatan Daerah.
- 2) Pada pendapatan daerah terdapat Jauh dibawah yang dianggarkan terdapat pada Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan; Rsud Adonara; Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang; Dinas Perhubungan; Dinas Komunikasi Dan Informatika; Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah; Dinas Perikanan; Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan; Dinas Perkebunan Dan Peternakan; Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan; Badan Keuangan Dan Aset Daerah; Badan Pendapatan Daerah.
- 3) Pada pendapatan daerah tidak terealisasi terdapat pada Perangkat Daerah : Dinas Perhubungan, Dinas Perkebunan Dan Peternakan; Badan Keuangan Dan Aset Daerah; Badan Pendapatan Daerah.
- 4) Pada Pendapatan daerah terealisasi tapi tidak dianggarkan terdapat pada perangkat daerah: Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga; Dinas Kesehatan; Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang; Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan; Dinas Perikanan; Badan Keuangan Dan Aset Daerah; Badan Pendapatan Daerah.
- 5) Pada belanja daerah jauh dibawah yang dianggarkan terdapat pada Perangkat Daerah: Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan

Olahraga; Dinas Kesehatan; Puskesmas Ile Bura; Puskesmas Boru; Rsud Adonara; Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang; Badan Penanggulangan Bencana Daerah; Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak; Dinas Perhubungan; Dinas Komunikasi Dan Informatika; Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah; Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan; Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan; Dinas Perdagangan Dan Perindustrian; Sekretariat Dprd; Badan Keuangan Dan Aset Daerah; Badan Pendapatan Daerah; Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sdm Daerah; Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik.

- 6) Pada belanja daerah . yang tidak terealisasi pada Perangkat Daerah : Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga; Dinas Kesehatan; Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah; Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Dinas Perkebunan Dan Peternakan; Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan; Sekretariat Dprd; Badan Keuangan Dan Aset Daerah; Badan Pendapatan Daerah; Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik.

b. Struktur APBD

- 1) Terdapat capaian realisasi Retribusi Daerah yang prosentase belum memadai sebesar 63,36% dan belum mencapai target kinerja yang ditetapkan sesuai ketentuan.
- 2) Terdapat capaian realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang sah prosentase belum memadai sebesar 52,37% dan belum mencapai target kinerja yang ditetapkan sesuai ketentuan.
- 3) Terdapat capaian realisasi Pendapatan hibah prosentase belum memadai sebesar 14,91 % dan belum mencapai target kinerja yang ditetapkan sesuai ketentuan.

- 4) Rasio kemandirian daerah menurun sebesar (0,14%) dari tahun 2023 sebesar 5,74% dan tahun 2024 5,60%.
- 5) Transaksi belanja Belum menggunakan kartu kredit pemerintah daerah (KKPD).
- 6) Belanja infraktur pelayanan publik belum mencapai 40% dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan atau transfer kepada daerah dan atau desa.

c. Laporan keuangan Pemerintah Daerah

- 1) Saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.495.454.608,-, bertambah sebesar Rp219.865.930,- atau naik 17,24% dari saldo tahun sebelumnya.
- 2) Saldo Piutang Lain-Lain PAD yang Sah per 31 Desember 2024 sebesar Rp11.168.828.225,69,-, bertambah sebesar Rp8.975.145.567,69,- atau 409,14% dari saldo tahun sebelumnya.
- 3) Saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2024 sebesar Rp83.740.250.599,70, bertambah sebesar Rp1.629.753.075,96 atau 1,98% dari saldo tahun sebelumnya.
- 4) Saldo Kewajiban per 31 Desember 2024 sebesar Rp9.362.481.535,41, bertambah sebesar Rp4.807.643.910,96 atau naik 105,55% dari saldo tahun sebelumnya.
- 5) Saldo Utang Belanja per 31 Desember 2024 sebesar Rp8.986.557.673,40, bertambah sebesar Rp5.075.137.238,97 atau 129,75% dari saldo tahun sebelumnya.
- 6) LHP = Masih terdapat temuan BPK pada Penyusunan laporan keuangan, Pendapatan, Belanja, dan asset.

14. Hasil evaluasi Kabupaten Ngada masih terdapat beberapa permasalahan umum pada aspek konsistensi, kebijakan, LKPD dan LHP BPK antara lain:

a. Pada aspek kebijakan

Perbandingan realisasi dengan anggaran masing-masing akun, jenis, obyek, dan rincian obyek pendapatan pada masing-masing

SKPD dan SKPKD pada rancangan perkadaKesesuaian penjumlahan rincian pendapatan masing-masing SKPD dan SKPKD dengan total pendapatan dalam Rancangan Perda dan Rancangan Perkada. Terdapat jenis, obyek, dan rincian obyek belanja pada SKPD dalam rancangan Perkada yang terealisasi: Jauh melebihi yang dianggarkan, Jauh di bawah yang dianggarkan, Tidak terealisasi, dan Terealisasi tetapi tidak dianggarkan.

- 1) pada pendapatan daerah terdapat realisasi Jauh melebihi yang dianggarkan terdapat pada Perangkat Daerah: Dinas Kesehatan; Dinas Lingkungan Hidup; Sekretariat Daerah; Badan Keuangan dan Aset Daerah; Badan Pendapatan Daerah.
- 2) pada pendapatan daerah terdapat Jauh dibawah yang dianggarkan terdapat pada Perangkat Daerah : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ; Dinas Kesehatan; Dinas Pekerjaan Perumahan Rakyat dan Pertanahan; Dinas Lingkungan Hidup; Dinas Perhubungan; Dinas Perikanan; Dinas Pariwisata; Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan; Sekretariat Daerah; Badan Keuangan dan Aset Daerah; Badan Pendapatan Daerah;
- 3) pada pendapatan daerah tidak terealisasi terdapat pada Perangkat Daerah : Dinas Perhubungan, Kecamatan Bajawa Utara; Kecamatan Jerebuu; Kecamatan Soa;
- 4) Pada Pendapatan daerah terealisasi tapi tidak dianggarkan terdapat pada perangkat daerah: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; Dinas Kesehatan; Dinas Lingkungan Hidup;
- 5) Pada belanja daerah jauh melebihi yang dianggarkan terdapat pada Perangkat Daerah: Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga; : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- 6) Pada belanja daerah jauh dibawah yang dianggarkan terdapat pada Perangkat Daerah: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; Dinas Kesehatan; RSUD Bajawa; Dinas Pekerjaan Perumahan

Rakyat dan Pertanahan; Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; Sekretariat Daerah; Sekretariat DPRD; Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan; Badan Keuangan dan Aset Daerah; Kecamatan Bajawa; Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

- 7) Pada belanja daerah yang tidak terealisasi pada Perangkat Daerah : Dinas Pekerjaan Perumahan Rakyat dan Pertanahan; Sekretariat Daerah; Badan Keuangan dan Aset Daerah; Kecamatan Riung.

b. Struktur APBD

- 1) Terdapat capaian realisasi Retribusi Daerah yang prosentase belum memadai sebesar 46,52% dan belum mencapai target kinerja yang ditetapkan sesuai ketentuan.
- 2) Terdapat capaian realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang sah prosentase belum memadai sebesar 47,20% dan belum mencapai target kinerja yang ditetapkan sesuai ketentuan.
- 3) Terdapat capaian realisasi Dana isentif daerah prosentase belum memadai sebesar 50,00% dan belum mencapai target kinerja yang ditetapkan sesuai ketentuan.
- 4) Terdapat capaian realisasi Belanja Gedung bangunan prosentase belum memadai sebesar 74,82% dan belum mencapai target kinerja yang ditetapkan sesuai ketentuan.
- 5) Terdapat capaian realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya prosentase belum memadai sebesar 71,16% dan belum mencapai target kinerja yang ditetapkan sesuai ketentuan.
- 6) Terdapat capaian realisasi Belanja bagi hasil prosentase belum memadai sebesar 59,22% dan belum mencapai target kinerja yang ditetapkan sesuai ketentuan.
- 7) Rasio kemandirian daerah menurun sebesar (2,16%) dari tahun 2023 sebesar 7,70% dan tahun 2024 5,53%.

- 8) Transaksi belanja Belum menggunakan kartu kredit pemerintah daerah (KKPD).

c. Laporan keuangan Pemerintah Daerah

- 1) Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 sebesar Rp67.301.000,-, bertambah Rp66.555.690,21 atau naik 8.929,94% dari saldo tahun sebelumnya.
- 2) Saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2024 sebesar Rp925.599.550,-, bertambah Rp266.034.500,- atau naik 40,33% dari saldo tahun sebelumnya.
- 3) Saldo persediaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.909.306.481,17, bertambah Rp2.909.306.481,17 atau naik 18,41% dari saldo tahun sebelumnya.
- 4) Saldo Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2024 sebesar Rp16.590.577.750,-, bertambah Rp2.693.512.950- atau naik 19,38% dari saldo tahun sebelumnya.
- 5) LHP = Masih terdapat temuan BPK pada Penyusunan laporan keuangan, Pendapatan, Belanja, dan asset

15. Hasil evaluasi Kabupaten Timor Tengah Utara masih terdapat beberapa permasalahan umum pada aspek konsistensi, kebijakan, LKPD dan LHP BPK antara lain:

a. Pada aspek Kebijakan

Perbandingan realisasi dengan anggaran masing-masing akun, jenis, obyek, dan rincian obyek pendapatan pada masing-masing SKPD dan SKPKD pada rancangan perkada. Kesesuaian penjumlahan rincian pendapatan masing-masing SKPD dan SKPKD dengan total pendapatan dalam Rancangan Perda dan Rancangan Perkada Terdapat jenis, obyek, dan rincian obyek belanja pada SKPD dalam rancangan Perkada yang terealisasi: Jauh melebihi yang dianggarkan, Jauh di bawah yang dianggarkan, Tidak terealisasi, dan Terealisasi tetapi tidak dianggarkan.

- 1) Pada belanja daerah jauh melebihi yang dianggarkan terdapat pada Perangkat Daerah: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan RSUD Kefamenanu.
 - 2) Pada belanja daerah jauh dibawah yang dianggarkan terdapat pada Perangkat Daerah: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas P2KB, Badan Keuangan dan Aset Daerah.
 - 3) Pada belanja daerah . yang tidak terealisasi pada Perangkat Daerah : Dinas Lingkungan Hidup, Dinas P2KB, Kecamatan Insana Fafinesu, Kecamatan Biboki Moenleu dan Badan Kesbangpol.
- b. Struktur APBD
- 1) Terdapat capaian realisasi Pajak Daerah yang prosentase belum memadai sebesar 53,76 % dan belum mencapai target kinerja yang ditetapkan sesuai ketentuan.
 - 2) Terdapat capaian realisasi Retribusi Daerah prosentase belum memadai sebesar 35,35% dan belum mencapai target kinerja yang ditetapkan sesuai ketentuan.
 - 3) Terdapat capaian realisasi Dana isentif daerah prosentase belum memadai sebesar 50,00% dan belum mencapai target kinerja yang ditetapkan sesuai ketentuan.
 - 4) Target dan realisasi PAD 3 (tiga) Tahun terakhir secara prosentase mengalami fluktuasi.
 - 5) Terdapat capaian realisasi belanja pegawai prosentasenya belum memadai sebesar 77,26%.
 - 6) Terdapat capaian realisasi Belanja Peralatan dan mesin prosentase belum memadai sebesar 68,21% dan belum mencapai target kinerja yang ditetapkan.
 - 7) Terdapat capaian realisasi Belanja Gedung bangunan prosentase belum memadai sebesar 59,21% dan belum mencapai target kinerja yang ditetapkan sesuai ketentuan.

- 8) Terdapat capaian realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya prosentase belum memadai sebesar 40,89% dan belum mencapai target kinerja yang ditetapkan sesuai ketentuan.
 - 9) Terdapat capaian realisasi Belanja Aset lainnya prosentase belum memadai sebesar 7045% dan belum mencapai target kinerja yang ditetapkan sesuai ketentuan.
 - 10) Rasio kemandirian daerah menurun sebesar (2,16%) dari tahun 2023 sebesar 7,70% dan tahun 2024 5,53%.
 - 11) Transaksi belanja Belum menggunakan kartu kredit pemerintah daerah (KKPD).
- c. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- 1) Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 sebesar Rp130.760.788,72, bertambah sebesar Rp66.691.316,38 atau naik 406,37% dari saldo tahun sebelumnya.
 - 2) Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.239.894.090,-, bertambah sebesar Rp653.111.140,- atau naik 41,16% dari saldo tahun sebelumnya.
 - 3) Saldo Piutang Pajak per 31 Desember 2024 sebesar Rp11.735.006.911,67, bertambah sebesar Rp176.754.915,- atau naik 1,74% dari saldo tahun sebelumnya.
 - 4) Saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.860.822.000,-, bertambah sebesar Rp353.094.000,- atau naik 23,42% dari saldo tahun sebelumnya.
 - 5) Saldo Persediaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp36.626.186.682,34 bertambah sebesar Rp19.074.192.148,89 atau naik 108,67% dari saldo tahun sebelumnya.
 - 6) Saldo Tagihan Jangka Panjang per 31 Desember 2024 sebesar Rp17.715.361.428,13, bertambah sebesar Rp3.363.305.150,81 atau naik 23,43% dari saldo tahun sebelumnya.
 - 7) LHP = Masih terdapat temuan BPK pada Penyusunan laporan keuangan, Pendapatan, Belanja, dan aset.

b. Solusi

1. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terus melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota agar menyampaikan LRA tepat waktu setiap minggu, sesuai jadwal yang ditentukan melalui grup whatsapp maupun dihubungi secara langsung.
2. Pemerintah Provinsi juga akan tetap melaksanakan fungsi pembinaan kepada kab/kota yang belum memulai proses transaksi dengan menggunakan kartu kredit pemerintah daerah.
3. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah mengarahkan Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Sabu Raijua, kabupaten Sumba Barat Daya, Kota Kupang, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Manggarai, kabupaten Lembata, Kabupaten Belu, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Ngada, Kabupaten TTU agar hal-hal teknis yang menjadi koreksi dalam Hasil evaluasi Ranperda Pertanggungjawaban TA 2024 menjadi bahan perbaikan untuk tahun anggaran berikutnya agar tidak mengulangi ataupun dapat meminimalisir kesalahan yang sama sehingga ada perbaikan kinerja pengelolaan keuangan daerah di tahun mendatang.

BAB V

PENUTUP

Demikian Laporan Kinerja Bulan Juli Tahun Anggaran 2025 Badan Keuangan Daerah ini disusun, sebagai bahan masukan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja pada lingkup Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025. Hal-hal lain yang belum dimuat dalam panduan ini akan dibahas saat evaluasi berlangsung.

Kupang, Agustus 2025

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,


Drs. BENHARD MENOH, MT
PEMBINA TINGKAT I (IV/B)
NIP. 19720512 199101 1 001